

**JUAL BELI AIR DENGAN STANDAR WAKTU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning,
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**DEVA DWI PEBIANTI
NPM: 1621030430
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H /2020 M**

**JUAL BELI AIR DENGAN STANDAR WAKTU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning,
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

DEVA DWI PEBIANTI

NPM: 1621030430

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., MM

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/ 2020M**

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk hidup, dalam hidupnya pasti membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan manusia itu sendiri beragam. Salah satu kegiatan perekonomian yang diawali dengan akad adalah Jual Beli. Jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli air dengan standar waktu merupakan jual beli yang dilakukan di Kelurahan Bukit Kemuning oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat musim kemarau. Karena jika musim kemarau tiba, masyarakat sekitar akan kekurangan air dan akan membeli air dengan standar waktu tersebut.

Permasalahan yang menjadi kajian peneliti adalah bagaimana praktik jual beli air dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning? dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskriptifkan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskriptifkan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan mengenai jual beli air dengan standar waktu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik *editing* dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan jual beli air dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning sudah berjalan cukup baik. Karena penjual menyediakan sumber air untuk dilakukan proses jual beli. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka proses jual beli tersebut dapat langsung dilaksanakan. Dalam pandangan hukum Islam, pelaksanaan jual beli air dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, transaksi ini tidak sah (batal) dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Meskipun dalam kenyataannya masyarakat tidak merasa keberatan, namun transaksi jual beli tersebut tidak sah dan hukumnya haram.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: DEVA DWI PEBIANTI

NPM: 1621030430

Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara)” adalah benar – benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2020

Penulis,




Deva Dwi Pebianti
NPM. 1621030430



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : JUAL BELI AIR DENGAN STANDAR WAKTU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit
Kemuning, Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama : DEVA DWI PEBIAN TI
NPM : 1621030430**

**Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
NIP. 195703051978031001**

Herlina Kurniati, S.H.I., M.F.I.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **JUAL BELI AIR DENGAN STANDAR WAKTU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Bukit Kemuning
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**. Disusun oleh
Deva Dwi Pebianti NPM. 1621030430. Program Studi Mu'amalah, telah diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 04 November 2020

TIM MUNAQASYAH

Ketua

:Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris

:Erik Rahman Gumiri, MH.

Penguji Utama

:Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Penguji II

:Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Penguji III

:Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

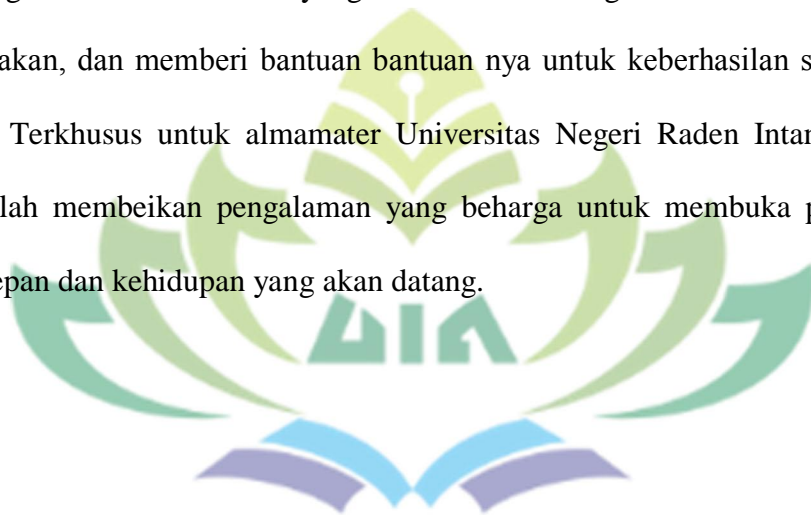
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
غَرَارٍ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِ)

Bersumber dari Abi Hurairah: “ Sesungguhnya Nabi S.A.W melarang jual beli
dengan cara lemparan dan jual beli secara *gharar*. ”
(HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Sakiman dan Ibunda tercinta Sukaesi Setyowati, terimakasih atas segala kerja keras yang Bapak dan ibu berikan untukku, teimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk anak-anak tercintanya, sehingga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih atas perjuangan yang telah kalian perjuangkan untuk memberikan kasih sayang kalian. Terimakasih banyak teuntuk kedua orangtuaku yang terbaik dalam hidupku, Kakakku tersayang Oktavia Lukitasari yang selalu mendukung dan memberi semangat, mendo'akan, dan memberi bantuan bantuan nya untuk keberhasilan saya selama belajar. Terkhusus untuk almamater Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah membeikan pengalaman yang berharga untuk membuka pintu dunia masa depan dan kehidupan yang akan datang.



RIWAYAT HIDUP

Deva Dwi Pebianti lahir di Bumi Dipasena Agung, Tulang Bawang pada tanggal 6 Februari 1998, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sakiman dan Ibu Sukaesi Setyowati. Pendidikan dimulai dari TK Dharmawanita Bumi Dipasena Mulya, dan selesai pada tahun 2004, SD Negeri 1 Bumi Dipasena Mulya, selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Rawajitu Timur dan selesai pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Padang Cermin selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2016/2017.



Bandar Lampung, 11 Oktober 2020

Yang Membuat,

Deva Dwi Pebianti

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan teimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. sebagai ketua jurusan/prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan ajaran yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., MM, dan Ibu Herlina Kurniati S.H.I,M.E.I , masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dala membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Kepala Badan Kesbangpol dan Staff Kotabumi.
9. Warga Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu dalam proses penelitian sampai penyelesaian skripsi ini.
10. Adila Okta Miranti tetangga rasa saudara yang telah membantu saya inspirasi untuk mendapatkan judul.
11. Sahabat seperjuangan Intan Adelia Andini, Lia Hernita, Mutiara Anggun, Linda Silviana, Meli Melani, Nur Khalimah, Neneng Nurmilasari, terimakasih atas semua semangatnya dan selalu ada disaat saya sedang mengalami kesulitan.

12.Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya kelas Muamalah I.

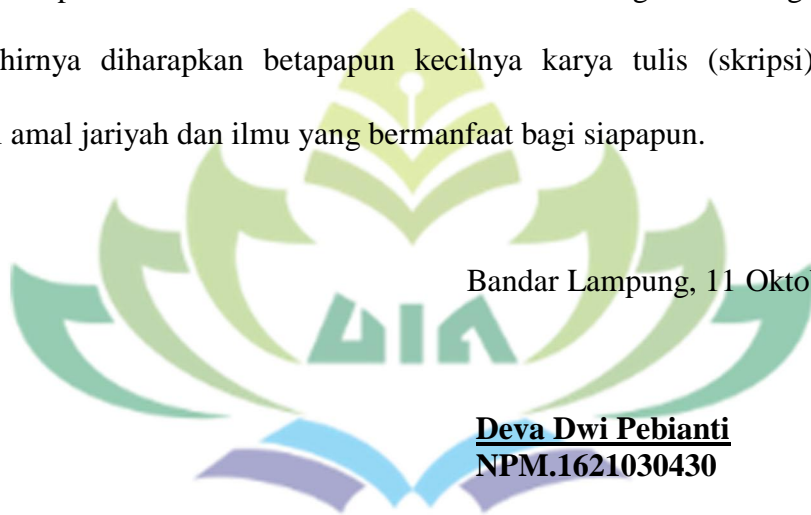
13.Kepada teman-teman KKN 167 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas semangatnya.

14.Kepada teman-teman lain yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat nya kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2020

Deva Dwi Pebianti
NPM.1621030430



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Masalah.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI.....	15
1. Akad	15
a. Pengertian Akad.....	15
b. Rukun dan Syarat Akad	17
c. Batal dan Berakhirnya Akad	20
2. Jual Beli dalam Perspektif Islam	22
a. Pengertian Jual Beli	22
b. Dasar Hukum Jual Beli	26
c. Rukun Jual Beli.....	29
d. Syarat Jual Beli	30
e. Macam-Macam Jual Beli	31
f. Jual Beli yang Dilarang	36
3. <i>Gharar</i>	47
a. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Gharar</i>	47
b. Macam-Macam <i>gharar</i>	47
c. Haramnya <i>Gharar</i> dalam Jual Beli	49
4. Konsep Dasar Hukum <i>Taklifi</i> dan <i>Wad'i</i>	50
a. Pengertian Umum	50
b. Pembagian Hukum	50
B. TINJAUAN PUSTAKA.....	56

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Hasil Penelitian.....	60
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Bukit Kemuning.....	60
2. Jumlah Penduduk.....	62
3. Kondisi Geografis Kelurahan Bukit Kemuning	65
4. Kondisi Sosial Ekonomi	65
5. Kondisi Sosial Keagamaan	67
6. Struktur Organisasi Kelurahan Bukit Kemuning.....	68
B. Pelaksanaan Jual Beli Air dengan Standar Waktu	69

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Analisis Praktek Jual Beli Air Standar Waktu di Kelurahan Bukit Kemuning	75
B. Analisis Hukum Islam Jual Beli Standar Waktu	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.	Tabel I: Tabel Jumlah
Penduduk Kelurahan Bukit Kemuning	62
2.	Tabel II: Tabel
Pemeluk Agama di Kelurahan Bukit Kemuning	67
3.	Tabel III: Rumah
Ibadah di Kecamatan Bukit Kemuning	67
4. Tabel IV: Daftar Harga Air dalam Menit di Kelurahan Bukit Kemuning ...	74



DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Bukit Kemuning	68



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran 1: Panduan Wawancara	
2. Lampiran 2: : Surat Izin Penelitian	
3. Lampiran 3 : Surat Pengajuan Seminar Proposal.....	
4. Lampiran 4 : Berita Acara Seminar Proposal	
5. Lampiran 5: Nilai Turnitin.....	
6. Lampiran 6: Blangko Konsultasi Skripsi	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Air dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” yaitu sebagai berikut:

Jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Sedangkan dalam syaria’at Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²

Air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman yaitu sebagai media pengangkutan zat – zat makanan, juga merupakan sumber energi serta sebagai keperluan lainnya.³ Air yang dimaksud dalam masalah ini adalah air yang berasal dari sumur bor. Air sumur bor ini dimiliki sendiri oleh penjual air tersebut. Air bersih tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari diantaranya untuk minum dan untuk kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus).

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 589.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, cet ke- 10 (Bandung: Al- Ma,arif, 1996), h. 120.

³ Endar Budi Sasongko dan Endang Widyastuti dan Rawuh Edy Priyono, “ *Kajian Kualitas Air dan Penggunaan Sumur Gali oleh Masyarakat di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap*”, jurnal Ilmu Lingkungan, vol 12 issue: 72-82 (2014), h.1.

Standar waktu, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).⁴ Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.⁵ Jadi arti dari standar waktu ini adalah suatu ketetapan ukuran waktu yang berisi tentang seluruh rangkaian proses ketika sedang berlangsung. Waktu yang dipergunakan untuk proses jual beli tersebut berupa menit.

Perspektif hukum Islam adalah pandangan tentang seperangkat aturan yang berdasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia untuk mengikat dan memaksa bagi seluruh umat Islam. Sesuatu yang mengikat dan memaksa sama sifatnya dengan hukum, yakni sama mengikat dan memaksa. Semua aturan yang bersifat memaksa dan mengikat harus kita patuhi dan taati. Terutama dalam hukum Islam, kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk melukiskan suatu peraturan pada permukaan yang datar yang dapat terlihat oleh mata yang dilihat melalui pandangan hukum Islam. Dalam hukum Islam, sesuatu yang tidak ditaati dan dipatuhi, maka akan ada imbalan yang setimpal yaitu mendapat dosa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul ini adalah persetujuan yang mengikat antara penjual dan pembeli yang menyangkut dengan air bersih menggunakan patokan standar waktu dan digambarkan dengan seperangkat aturan hukum Islam.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011, h. 1250.

⁵ *Ibid*, h. 1424.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif, jual beli air bersih menggunakan sistem waktu ini sangat jarang di lingkungan masyarakat dan mengakibatkan kerugian tersendiri terhadap konsumen yang tidak mempunyai penampungan yang besar.
2. Alasan Subjektif
 - a. Tema tentang jual beli air dengan sistem waktu tersebut sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.
 - b. Judul ini menurut penulis memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu tersebut. Maka dari itu manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju kehidupan yang berjalan lancar dan lebih baik. Maka dari itu Allah SWT memberikan naluri dan pemikiran kepada manusia supaya terbiasa dengan kehidupan dengan bersosial dan manusia harus bermuamalah terhadap manusia lain. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk melakukan jual beli untuk

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jual dan beli dilakukan untuk mengambil dan memberi sesuatu dengan cara bertukar menggunakan uang.

Di dalam jual beli terdapat dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang memberikan barang, dan pembeli adalah orang mengambil barang tersebut dan memberikan uang kepada penjual tersebut sebagai nilai tukar.

Salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar memperoleh keuntungan dari sesamanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara *ridho sama ridho*. Maka dari itu kita sebagai manusia sangat diperbolehkan untuk melakukan perniagaan (jual beli), dengan syarat tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

Islam menentang segala bentuk aktivitas yang mengakibatkan permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara bathil, baik dengan cara paksaan atau perampasan. Pengambilan barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar suka sama suka yang diwujudkan dalam bentuk kontrak.

Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan jual beli, sebaiknya harus memperhatikan syarat dan rukun dalam berjual beli, diantaranya harus ada akad (*ijab- qabul*), adanya benda atau barang

yang diperjual belikan, nilai tukar yang telah ditentukan, adanya pihak yang ber akad, harga. Seperti yang dijelaskan di atas jual beli harus memiliki akad, jual beli yang tidak diawali dengan akad, maka jual beli tersebut tidak sah.

Kelurahan Bukit Kemuning adalah desa yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, di mana sebagian besar masyarakat di sana bekerja sebagai pekebun, namun tak menutup kemungkinan desa yang asri dan nyaman yang masih sangat jarang terjamah oleh tingginya gedung, dikala musim kemarau desa tersebut juga cukup mengalami kesulitan air. Maka masyarakat pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjual air di daerah tersebut. Air yang digunakan tersebut air dari sumur bor milik pribadi. Maka pada saat musim kemarau tersebut lah si penjual air ini mengalami panen dari hasil penjualan air tersebut.

Sistem yang digunakan oleh penjual air ini adalah standar waktu, dimana air yang dijual tersebut dijual selama 45 menit dengan harga 20.000 rupiah. Kemudian proses jual beli tersebut terjadi di rumah penjual, dimana orang yang akan membeli air harus melakukan perjanjian/negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan antara keduanya. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, maka pembeli harus mempersiapkan wadah penampungan yang cukup besar untuk menampung air selama 45 menit tersebut. Dengan menggunakan selang paralon milik penjual, jika selang yang dibawa oleh penjual air tersebut tidak melampaui sampai rumah si pembeli, maka si pembeli yang harus menambah selang lagi dari si pemilik rumah. Akad jual beli ini dilakukan secara langsung di rumah penjual air. Setelah selesai proses pengaliran air tersebut, maka proses transaksi/pembayaran di rumah penjual.

Dalam jual beli ini pihak penjual menyiapkan waktu selama 45 menit, namun pihak penjual ini tidak mau tahu seberapa banyak air yang didapatkan oleh si pembeli, karena setelah mencapai 45 menit harga yang dibayarkan pembeli tetaplah 20.000 rupiah meskipun air yang didapatkan jumlah tidak sama antar pembeli yang satu dengan yang lainnya dikarenakan jarak rumah yang jauh.

Semakin jauh jarak rumah antara penjual dan rumah pembeli, maka semakin sedikit air yang diperoleh oleh pembeli. Namun warga desa Bukit Kemuning ini tidak merasa keberatan dengan sistem jual beli tersebut dikarenakan jual beli air ini sangat membantu untuk kehidupan warga sekitar. Praktik ini sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli air dengan standar waktu. Sehingga penulis membuat permasalahan ini dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Jual Beli Air dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam.”

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah area spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan tentang pelaksanaan jual beli air bersih dengan standar waktu antara penjual dan pembeli air yang ditinjau dengan perspektif hukum Islam di Desa Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah proposal ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian setelah melihat rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Lampung Utara.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi / manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya.

Dilihat dari tujuan penelitian di atas, maka signifikansidalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai jual beli air bersih dengan

menggunakan standar waktu menurut perspektif hukum Islam dan sumbangan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat, memperluas wawasan bagi masyarakat umum dan dapat memahami pandangan hukum Islam mengenai jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.

H. Metode Penelitian

Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian secara langsung tentang jual beli air dengan sistem waktu yang akan dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode itu sendiri diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁶ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk

⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal edisi 1 cet ke- 13*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 24.

memecahkan masalah- masalah praktis dalam masyarakat.⁷ Di samping itu selain menggunakan penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai penunjang untuk menambah referensi bagi penulis.

b. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini disebut penelitian deskriptif, karena dalam penelitian berisi tentang uraian dalam kalimat atau kata yang di pilih oleh penulis dari orang- orang yang berperilaku yang dapat dipahami. Dalam permasalahan ini penulis akan menggambarkan atau memaparkan tentang kondisi yang ada di lapangan tentang pelaksanaan praktik jual beli dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Adapun sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penjual dan pembeli air di Kelurahan Bukit Kemuning, Lampung Utara.

⁷Ibid, h. 28.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lainnya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder diperoleh dari perpustakaan yang berupa buku, dokumen, dan jurnal yang di dapatkan dengan cara membaca, menelaah, merangkum, dan mencatat sebagai referensi, kemudian di saring untuk penulis jadikan proposal ini.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.⁸ Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah 102 orang, yang dapat dibagi yaitu 100 orang pembeli air dan 2 orang penjual air.

2) Sampel

Sampel atau *sampling* berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lainnya yaitu untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari

⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

hasil penyelidikan. Selanjutnya untuk mengadakan penaksiran peramalan dan pengujian hipotesa yang telah dirumuskan.⁹ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.¹⁰ Untuk sekedar perkiraan, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar maka dapat diambil antara 10% - 15% atau lebih.¹¹ Dalam hal ini yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 12 orang, yakni 10 orang pembeli air dan 2 orang penjual.

d. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik yaitu tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹² Dalam hal ini penulis mendapatkan data dan informasi dengan cara datang dan melihat secara

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal edisi 1 cet ke- 13*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 55.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 170.

¹¹ *Ibid*, h. 173.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018) h. 145.

langsung tentang praktik jual beli air tersebut, yaitu pada rumah salah satu warga yang sedang membeli air.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹³ Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara lebih dalam mengenai hal yang terjadi. Model wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian ditanyakan kepada narasumber sambil penulis merekam dan merangkum jawaban dari narasumber.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, majalah, prasasti, notulen rapat, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁴ Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan orang lain yang

¹³*Ibid*, h. 147.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

selanjutnya ditulis oleh orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa foto saat sedang proses jual beli.

e. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pengecekan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk mengoreksi kesalahan- kesalahan yang terdapat dalam penulisan, sehingga kekurangannya dapat di lengkapi atau diperbaiki.

2) Sistematisasi Data (*Systemating*)

Systemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

f. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Pengertian menganalisis data sendiri itu ialah kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan atau kesimpulan.¹⁵

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

¹⁵Ronny Hanitejo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: Galia Indonesia, 1982, h. 83.

metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk menguraikan dan merinci kalimat- kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang praktik jual beli yang terjadi ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. *Aqad*

a. Pengertian *Aqad*

Sebelum melaksanakan kegiatan muamalah, sebaiknya kita harus melakukan *aqd*(perikatan / perjanjian) terlebih dahulu. Menurut bahasa, *aqd* antara lain berarti : الرِّبْطُ (mengikat), عَقْدَةٌ (sambungan), dan الْعَهْدُ (janji).

Mengikat (الرِّبْطُ) yaitu: "mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lainnya sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda. Sambungan (عَقْدَةٌ) yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

Artinya: "sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."

Janji(الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (Q.S

Al-Maidah:(5): 1)¹⁶

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: PT. J-Art, cet. ke-12, 2004 M, 1425 H), h. 106.

Istilah '*ahdu*' dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Perkataan '*aqdu*' mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*') dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap '*aqdi*' (persetujuan) mencakup tiga tahap:¹⁷

- 1) Perjanjian ('*ahdu*')
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- 3) Perikatan ('*aqdu*')

Bisa juga "ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi." Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian umum akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 44.

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Pengertian *aqd* dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, antara lain:

إِرْتِبَا طُ إِجَابٍ بِبِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”¹⁸

Dengan demikian, *aqd* merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.¹⁹ Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *aqd*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²⁰

b. Rukun dan Syarat Aqd

1) Rukun Aqd

Rukun *aqd* yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi akad. Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur, yaitu:²¹

a). *Shighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*)

b). *Aqidain* (dua pihak yang melakukan kontrak)

¹⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

¹⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah”*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 46

²⁰Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 45.

²¹Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2016), h. 25.

c). *Ma'qud Alaih* (objek kontrak)

Dari definisi ini maka yang menjadi rukun aqd di kalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari aqad adalah ikatan antara ijab dan kabul.

Rukun menurut jumhur fuqaha' selain Hanafiyah adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu.

Berdasarkan definisi ini, yang menjadi rukun aqd di kalangan jumhur fuqaha ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qudalaih* (objek akad), dan *shighat aqad* (ijab dan kabul).²²

2) Syarat Akad

Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan dengan akad sebagai berikut:²³

- a). Syarat-syarat terjadinya aqd, yaitu sesuatu yang menjadikan aqd sah menurut syara', maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap aqd. Sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian aqad dan tidak harus ada pada bagian lainnya. Misalnya disyaratkannya bisa diserahkan objek benda dalam aqd, baik dalam jual beli, hibah, pinjam-meminjam, gadai, dan yang lainnya, maka jika tidak demikian hukumnya batal aqd tersebut.

²²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya*...., h. 46-47.

²³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),, h. 19.

- b). Syarat sahnya aqd, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara' untuk mengatur dampak aqd. Jika syarat tidak terpenuhi, maka aqd rusak. Di antara syarat sahnya aqd yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya aqd dari enam hal, yaitu kesamaran (*jahalah*), pemaksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), ketidakjelasan (*gharar*), kemadharatan (*dharar*), dan syarat yang rusak (*syarth al-fasid*).
- c). Syarat pelaksanaan *aqd*. Disyaratkan agar *aqd* itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kebebasan mentashrufkan dan memanfaatkan benda, kecuali terdapat larangan yang melarangnya, seperti gila, idiot, bodoh, dan masih kecil. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentashrufkan benda, baik hal asli seperti yang dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau orang yang diberikan wasiat olehnya.
- d). Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad adalah adanya kepastian hukum (*lazim*). Disyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad. Misalnya *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, atau *khiyar rukyat*.

c. Batal dan Berakhirnya Akad

1) Batalnya Akad

Dalam praktiknya, kontrak bisa terjadi pembatalan sebelum dilaksanakan. Ada beberapa sebab pembatalan penawaran (*ijab*), yaitu sebagai berikut: ²⁴

- a) Pembatalan oleh pembuat penawaran. Menurut para ulama, penawaran bisa dibatalkan sebelum terjadinya penerimaan (*qabul*) oleh pihak kedua. Kebolehan pembatalan ini karena pihak yang akan menerima belum terjadi. Pendapat ini didukung oleh Hanafi.
- b) Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan. Kematian salah satu pihak menyebabkan hilangnya penawaran.
- c) Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tindakan.
- d) Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan dengan berakhirnya tempat perjanjian sebelum penerimaan (*qabul*) dari pihak lain (kedua).

2) Berakhirnya Akad

Aqd berakhirnya dengan sebab *fasakh*, kematian. Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berakhir:

- a) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi: ²⁵

²⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 151.

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya....*, h. 61.

(1) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Apabila terjadi akad fasid, seperti *ba'i majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk *memfasakhkan*, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

(2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh *memfasakhkan* akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh *memfasakhkan* akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

(3) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridaan pihak lain.

(4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/harga).

Misalnya, pada akad jual beli barang rusak seblum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

(5) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.

b) Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain Hanafiyah akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzaraah*, dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.

c) Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad *mauquf*.

2. Jual Beli dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Jual Beli

Lafazh البيع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Para ahli menggunakan istilah البيع kepada makna yang mengeluarkan atau pemindahan sesuatu dari pemiliknya dengan harga tertentu.²⁶

Secara bahasa (etimologi), jual beli berarti :

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba’i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.

Hal ini sebagaimana firman Allah:

²⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*..., h. 9.

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ (الْأَلْيَةِ)

Artinya: ...“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

(Q.S Al-Fathir:(35):29)²⁷

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat ulama fiqh yang mendefinisikan jual beli, meskipun memiliki arti dan substansi yang tidak jauh berbeda, diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a) Definisi dalam arti umum, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “ jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”²⁸

b) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “ jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”²⁹

2) Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

²⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.111.

²⁸Abdurrahman Al-Jazairi, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzhab al- Arba'ah, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

²⁹Ibid, h. 135.

a) Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَ وَضْعٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتْعَةٍ لَذَّةٍ

Artinya: “ jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”³⁰

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.³¹

b) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتْعَةٍ لَذَّةٍ أَوْ مَكَايَسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيَّةٍ غَيْرُ نَحْبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya: “ jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”³²

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya

³⁰ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al- Fikr, 2004), h. 204.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69.

³² Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III...., h. 372.

dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³³

3) Menurut Imam Syafi'i, beliau mendefinisikan jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan kedua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³⁴

4) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.

5) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'athaa* (tanpa *ijab-qabul*).³⁵

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 70.

³⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, penerjemah: Abdul Hayyie Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*, yakni:

1) Al-Qur'an, diantaranya:

a) Surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ...“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”...(Q.S. Al-Baqarah:(2):275).

Berdasarkan ayat tersebut, disebutkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.³⁶

Dibolehkannya jual beli karena memang jual beli sangat dibutuhkan oleh semua manusia pada umumnya. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Kadang apa yang dibutuhkannya berada di tangan orang lain. Maka dengan jual beli, manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³⁷

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

³⁷ *Ibid*, h. 179.

b) Surah Al-Baqarah ayat 282:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S.Al-Baqarah: 282).

c).Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: (4):29)

Menurut Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syara'.³⁸

2) As-sunnah, diantaranya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

³⁸Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 72.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ , وَالْمُخَاضِرَةِ , الْمَلَامَسَةِ , وَالْمُنَا بَذَّةٍ , وَالْمُزَابَنَةِ .

(رواه البخارى)

Artinya: “ Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW., melarang melakukan jual beli yang belum ditunaikan, jual beli yang buahnya blum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli timbangannya tidak diketahui. (HR. Bukhori Nomor: 2207)³⁹

حَدَّثَنِي الْأَسْوَادُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخارى)

Artinya: “ telah berkata Al Aswad, dari Aisyah r.a bahwasannya Nabi Muhammad Saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan menggadaikan baju besinya (HR. Bukhari)⁴⁰

3) Ijma’:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴¹

Tidak semua harta benda diperbolehkan untuk dijadikan objek transaksi dalam jual beli, yakni harta benda yang menjadi kepemilikan bersama atau publik tidak boleh sebagai objek transaksi jual beli. Sebagian *Qaum* (ulama) berpendapat bahwa, perkara air, *al kala*, dan api

³⁹ Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Terj.), Surabaya : CV. Karya Utama, 2012), h. 154

⁴⁰ *Ibid*, h. 156.

⁴¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., h 74-75.

tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu dan tidak sah untuk diperjualbelikan secara mutlak. Pendapat yang masyur di kalangan ulama, yang dimaksud dengan *al kala* ialah rumput yang diperbolehkan tumbuh di atas tanah yang tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu, maksud dari air diantaranya: mata air, sumber air, air sungai, yang tidak dimiliki oleh orang tertentu. (Air tersebut tidak berada di tanah atau lahan yang dimiliki orang secara sah). Maksud api ialah api bakar.⁴²

c. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

1) Penjual

Yaitu, pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

2) Pembeli

Yaitu, orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

3) Barang jualan

Yaitu, sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

⁴² Muhammad Bin Abdul Hadi As Sindi, *Kifayah Al Hajat Fi Syarh Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1138 H), Juz II, h. 91.

4) Sighat (*Ijab Qabul*)

Yaitu, persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah teima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴³

d. Syarat Jual Beli

1) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2) Obyek jual beli

a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).

b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

c) Barang yang akan diperjualbelikan merupakan barang berwujud.

d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

3) Harga

a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.

b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

⁴³A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h 112.

- c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.⁴⁴

e. Macam – Macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:⁴⁵
 - a) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- 2) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
 - a) Jual beli yang menguntungkan (*Al- Murabahah*)
 - b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*tauliyah*)
 - c) Jual beli rugi (*Al –Khasarah*)
 - d) Jual beli *al- Musawanah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 136-138.

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 101.

3) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

- a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - (1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - (2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁴⁶

Dalam pendapat lain, jumhur fuqaha membagi jual beli kepada shahih dan bathil, yaitu:

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan

⁴⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 174.

khiyar lagi,⁴⁷ maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.⁴⁸

2) Jual Beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, yaitu:⁴⁹

a). Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.

Jual beli *bathil* ini ada beberapa macam, yakni:⁵⁰

(1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad,

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 121.

⁴⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dala Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128.

⁴⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah....*, h. 71.

⁵⁰*Ibid*, h. 71- 72

misalnya memperjual belikan buah- buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang bathil.

(2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan

Para ulama baik dari kalangan Hanfiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara dan ikan di laut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang *bathil*.

(3) Jual beli *gharar*, kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open ended* mengandung unsur *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.⁵¹

⁵¹Efa Rodiah Nur, “ Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern “, *Jurnal Al Adalah*. vol.12, No 1 2015, (Bandar Lampung : Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016, h. 656 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> (10 September 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

(4) Jual beli najis dan benda –benda najis

Para ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah, dan sperma, karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap mal (harta).⁵²

(5) Jual beli *urbun* (*porsekot*),

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.

(6) Jual beli air

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda – benda yang dimiliki secara bersamaan oleh seluruh manusia, seperti air, udara, tanah. Seluruh air seperti air laut, sungai, dan sumur tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong *mal mubah*.

Larangan ini tidak berlaku jika *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al- mubahat* atau *isti'la' ala al-mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan

⁵²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 74-77.

di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah air untuk dijadikan air minum. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.⁵³

- b). Jual Beli Fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas, (*ahliyah*) atau jual beli yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.⁵⁴

f. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:⁵⁵

1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

a) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah.

Begitupula sejenisnya, seperti orang mabuk, *sakalor*, dll.

⁵³Rozalinda *Fikih Ekonomi Syariah*..., h. 79.

⁵⁴*Ibid*, h. 80.

⁵⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ..., h 93.

b) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka beralasan untuk melatih kedewasaan dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli. dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (Q.S. An-Nisa: (4) : 6).

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat. adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa merupakan jual beli yang ditangguhkan. oleh karena itu,

keabsahannya ditangguhkan sampai rela. menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁵⁶

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan *zalim*.

2) Terlarang sebab *sighat*

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak

⁵⁶ *Ibid*, h. 95.

memakai *ijab-qabul*. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada *ijab* dari salah satunya.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan.

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Apabila tidak dapat dipahami atau tulisannya tidak jelas maka akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab qabul*

Jual beli tidak bersesuaian dengan *ijab qabul*, maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijab* dari pihak penjual dengan *qabul* dari pihak pembeli. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan

harga, menurut ulama Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah dianggap *fasid*, dan batal menurut jumhur ulama.⁵⁷

3) Terlarang sebab *Ma'uqud 'Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'uqud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'uqud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Masalah yang disepakati ulama yang diperselisihkan diantaranya:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada adalah tidak sah.

⁵⁷*Ibid*, h. 97.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c) Jual beli *gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli susu yang masih ada di ibunya, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih ada di dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَارٍ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِي

Artinya: Bersumber dari Abi Hurairah: “ Sesungguhnya Nabi

S.A.W. melarang jual beli dengan cara lemparan dan jual

beli secara *gharar*.” (HR. Jama'ah kecuali Imam

Bukhari).⁵⁸

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

- (1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya menjual janin yang masih di dalam perut

⁵⁸ Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 465.

binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lainnya adalah menjual ikan yang masih ada di dalam air (tambak).

(2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal.

(3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda

yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.

(4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang dijual.

Misalnya “ Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda” tanpa menentukan ciri-ciri benda tersebut secara tegas. Contoh lainnya misalnya menjual buah-buahan yang masih belum layak dikonsumsi.

(5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.

Misalnya orang berkata: “ saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras juga bermacam-macam dan harganya juga tidak sama.

(6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.

Misalnya: setelah seseorang meninggal, jual beli semacam ini termasuk *gharar*, karena objek akad dipandang belum ada.

- (7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Namun sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
- (8) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya: salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Termasuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya.
- (9) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya: menjual kuda pacu yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual beli gharar karena antar penjual dan pembeli berspekulasi dalam jual beli ini.

d) Jual beli barang yang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama Malikiyah memperbolehkannya setelah dibersihkan.

e) Jual beli yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur, batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

f) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap, dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

g) Jual beli buah-buahan atau sayuran

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.⁵⁹

4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat jika jual beli memenuhi rukun dan syarat nya maka jual beli tersebut sah. Namun ada beberapa masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut:

a) Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riba *fadhli* fasid menurut ulama Hanafiyah, namun batal menurut para jumhur ulama.

⁵⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h 99.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim.

c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yaitu mencegat (menghentikan) pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Jika barang hasil pencegatan tersebut dijual kembali dan orang yang membelinya mengetahui bahwa itu barang hasil pencegatan maka, hukumnya haram. Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahui adalah hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu *makruh tahrim*, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh khiiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.

d) Jual beli waktu azan Jum'at

Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, beliau menghukuminya dengan *makruh tahrim*. Sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika *khatib* sudah berada di mimbar.

e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah *zahirnya shahih*, tetapi *makruh*, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g) Jual beli barang yang sudah dibeli oranglain

Yaitu seseorang yang telah sepakat akan membeli sesuatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

h) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, misalnya “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak ini dijahit dahulu.” Begitupula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salahsatu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang akad.⁶⁰

⁶⁰*Ibid*, h. 99-101.

3. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar* dan Dasar Hukum *Gharar*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁶¹ Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁶² Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

b. Macam-Macam *Gharar*

Lebih jauh mengenai *gharar*, maka *gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqd* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

1) *Gharar* dalam *sighat aqd*

Gharar pada *sighat* yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah

⁶¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 97.

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147.

pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *gharar* sighat dibagi menjadi:

- a) Dua jual beli dalam satu jual beli
 - b) Jual beli *urbun*
 - c) Jual beli *munabazah*
 - d) Jual beli *hasah*
 - e) Jual beli *mulamasah*
 - f) Akad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan.⁶³
- 2) *Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*.

Gharar dalam benda yang berlaku pada *aqadnya* yaitu:⁶⁴

- a) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- b) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- c) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan

⁶³ Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, Semarang: Toha Putra 2011, h. 111.

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz III dan IV*, JAKARTA: Penerbit Lentera, 2009, h. 158.

- d) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- e) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- f) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- g) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksi
- h) Transaksi pada benda yang tidak ada
- i) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.

c. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *Gharar* yang dilarang ada 10 macam, yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat atau kualitas barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika Zaed datang”.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang.

Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

- j. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempari bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.

4. Konsep Dasar Hukum *Taklifi* dan *Wad'i*

a. Pengertian Umum

Mayoritas ulama ushul Fiqh mendefinisikan hukum sebagai berikut: “*Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperative, fakultif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang*”. Kemudian, yang dimaksud *Khitob Allah* dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur'an, As-Sunnah maupun yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun *ijma'* dan *qiyas* hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Yang dimaksud perbuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan, seperti *ghibah* (menggunjing) dan *namimah* (mengadu-domba).⁶⁵

b. Pembagian Hukum

Bertitik dari latar belakang hukum di atas, maka hukum menurut ulama ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum *taklifi* dan *wad'i*.

⁶⁵Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-IV, 2010, h. 295.

1) Hukum *Taklifi* (Pembebanan)

Hukum *taklifi* ialah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Misalnya, hukum sholat, membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan contoh yang bersifat memilih (*fakultatif*) adalah makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.⁶⁶

Terkait bentuk-bentuk hukum *taklifi* terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum *taklifi*. Pertama, bentuk-bentuk hukum *taklifi* menurut jumhur ulama Ushul Fiqh atau *mutakalimin*. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, yaitu *ijab*, *nadb*, *ibahah*, *karahah* (makruh), dan *tahrim*. Kedua, bentuk-bentuk hukum *taklifi* seperti *iftirad*, *ijab*, *nabd*, *ibahah*, *karahah tanzhiliyah*, *karahah tahrimiyyah*, dan *tahrim*.

a) *Ijab* atau Wajib

Ijab adalah suatu tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi. Sesuatu yang wajib tersebut pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan azab.⁶⁷

⁶⁶*Ibid*, h. 297.

⁶⁷Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul* Penj. Abu Shilah dkk, (t.tp: 2007), h. 8.

b) *Nadb* atau Sunnah

Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman.⁶⁸ Suatu yang *nadb* itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab.

c) *Ibahah* atau Mubah

Khitab Allah yang bersifat *fakultatif* megandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari *khitab* Allah ini disebut juga dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah*. Kata *mubah* memiliki nama lain halal dan jaiz. Mubah atau *ibahah* senantiasa berada pada sifat mubah (boleh), maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula azab.⁶⁹

d) *Karahah*

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang bersifat memaksa. Dan tidak dikenai hukuman. *Karahah* atau makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan azab.⁷⁰

⁶⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., h. 298.

⁶⁹ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, ..., h. 9

⁷⁰ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, ..., h. 11.

e) *Tahrim*

Tuntutan untuk tidak mengejakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut *hurmah* dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan azab.⁷¹

Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan *khitab tasyri'*, seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mandub.⁷²

2) Hukum *Wad'i*

Hukum *wad'i* adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum *taklifi*, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum *wad'i*. Di dalam ilmu hukum disebut pertimbangan hukum. Macam-macam hukum *wad'i* yaitu sebagai berikut:

a) Sebab

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan *syar'i* sebagai adanya hukum.

⁷¹ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, ..., h. 10.

⁷² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., h. 302.

b) Syarat

Sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum *syara'* bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum *syara'*. Oleh sebab itu, suatu hukum *taklifi* tidak dapat diterapkan kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara'. Misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.⁷³

c) *Man'i* (Penghalang)

Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan. Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut.⁷⁴

d) *Sihah*

Hukum yang sesuai dengan tuntutan *syara'*. Yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada *man'i*. Misalnya, mengerjakan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya

⁷³Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., h. 314.

⁷⁴*Ibid*, h. 314.

(tidak haid, nifas, dan lain sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun *man'i* nya tidak ada.⁷⁵

e) Batal (Tidak Sah)

Terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjualbelikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak dinilai harta dalam pandangan syara'.

f.) '*Azimah* dan *Rukhsah*

'*Azimah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh *mukallaf* wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah empat rakaat disebut dengan '*azimah*. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut *rukhsah*. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan *rukhsah* dengan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada *udzhur*.⁷⁶

⁷⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,h. 315.

⁷⁶ *Ibid*, h. 316.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan judul tentang jual beli air, sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Rizki Eka Prasetyo tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul : “Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Rumusan Masalah: Bagaimana praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul dalam tinjauan Hukum Islam? Hasil Penelitian: Dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari segi subyek jual beli (*Aqidani*) jual beli air dari sumber umum itu diperbolehkan karena yang melakukan jual beli ini orang dewasa yang sudah *mumayyiz* serta tidak ada paksaan dalam jual beli tersebut. Dari segi akad transaksi jual beli (*sighat*) jual beli air dari sumber mata air umum diperbolehkan karena sudah termasuk akad transaksi yang diperbolehkan yaitu dengan cara lisan yang tidak mengakibatkan persengketaan dalam jual beli tersebut. Dari segi objek jual beli (*Ma’uqud ‘Alaih*) jual beli air dari sumber mata air umum tidak diperbolehkan pada musim kemarau karena jumlah air terbatas yang menyebabkan air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang mengalami kekeringan dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengambil air dari sumber mata air tersebut. Maka untuk menjual belikan air dari sumber mata air untuk umum yang sangat terbatas di musim kemarau tidak diperbolehkan, karena merugikan

masyarakat pengguna air lainnya di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul untuk memperoleh sumber mata air umum.⁷⁷ Yang menjadi perbandingan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis buat yaitu dalam skripsi penulis, kepemilikan dalam jual beli air dari sumber umum merupakan milik bersama dimana masyarakat berhak mengambil secara umum tanpa paksaan.

2. Skripsi yang dibuat oleh M. Adib Mubarak tahun 2009 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “ Praktik Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)”. Rumusan Masalah: 1). Bagaimana akad jual beli Sumber Air di Desa Ngaditirto? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad Jual Beli sumber air di Desa Ngaditirto? Hasil Penelitian: Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad yang digunakan di dalam praktek jual beli sumber air di Desa Ngaditirto adalah akad jual beli bersyarat, yaitu jual beli tanah dengan syarat sumber air yang ada pada lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli secara mutlak. Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, maka jual beli sumber air yang merupakan hak publik jelas dilarang oleh nabi. Air merupakan kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya, dan dikelola secara bersamaan. Akad jual

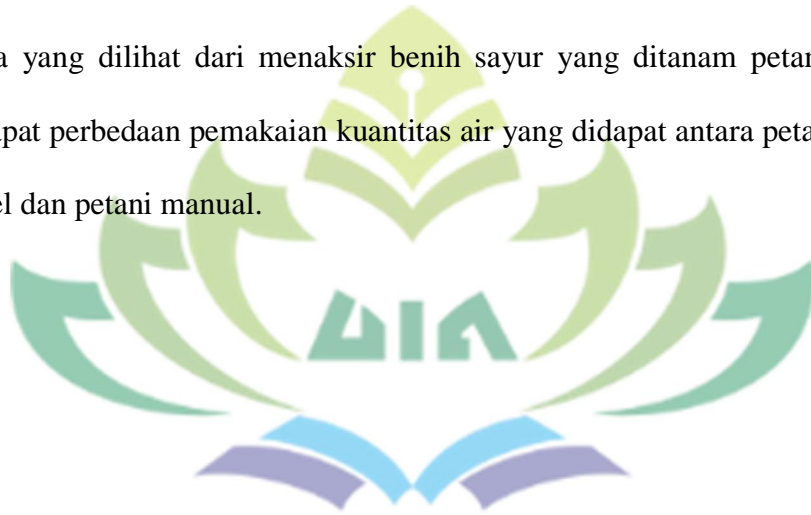
⁷⁷Rizki Eka Prasetyo, “*Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam.*” (Skripsi Program Sarjana Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, h. 72.

beli di Desa Ngaditirto belum sesuai dengan aturan syar'i Islami karena tidak menghiraukan warga lain yang membutuhkan air tersebut. Apabila ditinjau dari cara mendapatkan air, usaha yang dilakukan pembeli air juga dari tujuannya maka jual beli sumber air seperti ini menurut penulis sah demi hukum. Kesimpulan ini dengan pertimbangan bahwa hukum Islam bersifat elastis, dimana variabel dengan jual beli sumber air, jika dilihat segi tujuan dan manfaatnya maka praktek jual beli sumber ini bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam.⁷⁸ Yang menjadi perbandingan antara skripsi di atas dengan skripsi yang penulis buat yaitu yang dijadikan objek jual beli air dimana air tersebut berada di tanah yang transaksinya di bawah tangan. Dan masyarakat sekitar dilarang mengambil air tersebut.

3. Skripsi yang dibuat oleh Yazied tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian”. Rumusan masalah:
1). Bagaimana sistem penetapan harga jual beli air irigasi yang dilakukan di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga air irigasi di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? Hasil penelitian: Penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli air irigasi di Desa Karangasem diperbolehkan karena syarat dan rukun telah terpenuhi, sedangkan mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan memakai

⁷⁸ M. Abid Mubarak, “ *Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009) h. 68.

kuantitas air yang didapat antara petani memakai diesel dan petani manual. *Ma'fhum Mukholafah* dari pernyataan tersebut adalah penetapan harga air yang diperbolehkan selama ada cara untuk menakarnya. Namun demikian patokan di masyarakat yang menaksir benih sayur yang ditanam sepersekian menghasilkan hasil yang sepersekian menjadikan penetapan harga tersebut boleh, selain itu dalam Islam terdapat praktek *ijaroh* yaitu penukaran manfaat barang antara penyedia jasa dan pemakai jasa yang mana pemakai jasa dikenal konskuensi membayar *ujroh* kepada penyedia jasa.⁷⁹ Dari tinjauan pustaka di atas, maka dapat dibuat perbandingan dari skripsi ini, yaitu dari segi penetapan harga yang dilihat dari menaksir benih sayur yang ditanam petani sehingga terdapat perbedaan pemakaian kuantitas air yang didapat antara petani memakai diesel dan petani manual.



⁷⁹Yazied, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian* (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), h. 76.

BAB II LANDASAN TEORI

B. Kajian Teori

2. *Aqad*

b. Pengertian *Aqad*

Sebelum melaksanakan kegiatan muamalah, sebaiknya kita harus melakukan *aqd*(perikatan / perjanjian) terlebih dahulu. Menurut bahasa, *aqd* antara lain berarti : الرِّبْطُ (mengikat), عَقْدَةٌ (sambungan), dan الْعَهْدُ (janji).

Mengikat (الرِّبْطُ) yaitu: "mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lainnya sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda. Sambungan (عَقْدَةٌ) yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

Artinya: "sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."

Janji(الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (Q.S

Al-Maidah:(5): 1)⁸⁰

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: PT. J-Art, cet. ke-12, 2004 M, 1425 H), h. 106.

Istilah '*ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap '*aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap:⁸¹

- 1) Perjanjian ('*ahdu*)
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- 3) Perikatan ('*aqdu*)

Bisa juga "ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi." Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian umum akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 44.

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Pengertian *aqd* dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, antara lain:

إِرْتِبَا طُ إِجَابٍ بِبِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”⁸²

Dengan demikian, *aqd* merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.⁸³ Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *aqd*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁸⁴

b. Rukun dan Syarat Aqd

1) Rukun Aqd

Rukun *aqd* yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi akad. Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur, yaitu:⁸⁵

a). *Shighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*)

b). *Aqidain* (dua pihak yang melakukan kontrak)

⁸²Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

⁸³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah”*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 46

⁸⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 45.

⁸⁵Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2016), h. 25.

c). *Ma'qud Alaih* (objek kontrak)

Dari definisi ini maka yang menjadi rukun aqd di kalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari aqad adalah ikatan antara ijab dan kabul.

Rukun menurut jumhur fuqaha' selain Hanafiyah adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu.

Berdasarkan definisi ini, yang menjadi rukun aqd di kalangan jumhur fuqaha ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qudalaih* (objek akad), dan *shighat aqad* (ijab dan kabul).⁸⁶

2) Syarat Akad

Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan dengan akad sebagai berikut:⁸⁷

a). Syarat-syarat terjadinya aqd, yaitu sesuatu yang menjadikan aqd sah menurut syara', maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap aqd. Sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian aqad dan tidak harus ada pada bagian lainnya. Misalnya disyaratkannya bisa diserahkan objek benda dalam aqd, baik dalam jual beli, hibah, pinjam-meminjam, gadai, dan yang lainnya, maka jika tidak demikian hukumnya batal aqd tersebut.

⁸⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya*...., h. 46-47.

⁸⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),, h. 19.

- b). Syarat sahnya aqd, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara' untuk mengatur dampak aqd. Jika syarat tidak terpenuhi, maka aqd rusak. Di antara syarat sahnya aqd yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya aqd dari enam hal, yaitu kesamaran (*jahalah*), pemaksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), ketidakjelasan (*gharar*), kemadharatan (*dharar*), dan syarat yang rusak (*syarth al-fasid*).
- c). Syarat pelaksanaan *aqd*. Disyaratkan agar *aqd* itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kebebasan mentashrufkan dan memanfaatkan benda, kecuali terdapat larangan yang melarangnya, seperti gila, idiot, bodoh, dan masih kecil. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentashrufkan benda, baik hal asli seperti yang dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau orang yang diberikan wasiat olehnya.
- d). Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad adalah adanya kepastian hukum (*lazim*). Disyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad. Misalnya *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, atau *khiyar rukyat*.

c. Batal dan Berakhirnya Akad

1) Batalnya Akad

Dalam praktiknya, kontrak bisa terjadi pembatalan sebelum dilaksanakan. Ada beberapa sebab pembatalan penawaran (*ijab*), yaitu sebagai berikut: ⁸⁸

- a) Pembatalan oleh pembuat penawaran. Menurut para ulama, penawaran bisa dibatalkan sebelum terjadinya penerimaan (*qabul*) oleh pihak kedua. Kebolehan pembatalan ini karena pihak yang akan menerima belum terjadi. Pendapat ini didukung oleh Hanafi.
- b) Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan. Kematian salah satu pihak menyebabkan hilangnya penawaran.
- c) Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tindakan.
- d) Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan dengan berakhirnya tempat perjanjian sebelum penerimaan (*qabul*) dari pihak lain (kedua).

2) Berakhirnya Akad

Aqd berakhirnya dengan sebab *fasakh*, kematian. Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berakhir:

- a) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi: ⁸⁹

⁸⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 151.

⁸⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya....*, h. 61.

(1) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Apabila terjadi akad fasid, seperti *ba'i majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk *memfasakhkan*, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

(2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh *memfasakhkan* akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh *memfasakhkan* akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

(3) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridaan pihak lain.

(4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/harga).

Misalnya, pada akad jual beli barang rusak seblum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

(5) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.

b) Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain Hanafiyah akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzaraah*, dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.

c) Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad *mauquf*.

2. Jual Beli dalam Perspektif Islam

d. Pengertian Jual Beli

Lafazh البيع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Para ahli menggunakan istilah البيع kepada makna yang mengeluarkan atau pemindahan sesuatu dari pemiliknya dengan harga tertentu.⁹⁰

Secara bahasa (etimologi), jual beli berarti :

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba’i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.

Hal ini sebagaimana firman Allah:

⁹⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*..., h. 9.

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ (الْأَلْيَةِ)

Artinya: ...“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

(Q.S Al-Fathir:(35):29)⁹¹

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat ulama fiqh yang mendefinisikan jual beli, meskipun memiliki arti dan substansi yang tidak jauh berbeda, diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a) Definisi dalam arti umum, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “ jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”⁹²

b) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “ jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”⁹³

2) Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

⁹¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.111.

⁹²Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzhab al- Arba'ah, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

⁹³Ibid, h. 135.

a) Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَ وَضْعٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتْعَةٍ لَذَّةٍ

Artinya: “ jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”⁹⁴

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁹⁵

b) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتْعَةٍ لَذَّةٍ أَوْ مَكَايَسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيَّةٍ غَيْرُ نَحَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya: “ jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”⁹⁶

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya

⁹⁴ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al- Fikr, 2004), h. 204.

⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69.

⁹⁶ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III...., h. 372.

dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹⁷

3) Menurut Imam Syafi'i, beliau mendefinisikan jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan kedua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁹⁸

4) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.

5) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'athaa* (tanpa *ijab-qabul*).⁹⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 70.

⁹⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, penerjemah: Abdul Hayyie Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

e. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*, yakni:

1) Al-Qur'an, diantaranya:

a) Surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ...“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”...(Q.S. Al-Baqarah:(2):275).

Berdasarkan ayat tersebut, disebutkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.¹⁰⁰

Dibolehkannya jual beli karena memang jual beli sangat dibutuhkan oleh semua manusia pada umumnya. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Kadang apa yang dibutuhkannya berada di tangan orang lain. Maka dengan jual beli, manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 179.

b) Surah Al-Baqarah ayat 282:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S.Al-Baqarah: 282).

c).Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: (4):29)

Menurut Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syara'.¹⁰²

2) As-sunnah, diantaranya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁰²Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 72.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ , وَالْمُخَاضِرَةِ , الْمَلَامَسَةِ , وَالْمُنَا بَذَّةٍ , وَالْمُزَابَنَةِ .

(رواه البخارى)

Artinya: “ Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW., melarang melakukan jual beli yang belum ditunaikan, jual beli yang buahnya blum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli timbangannya tidak diketahui. (HR. Bukhori Nomor: 2207)¹⁰³

حَدَّثَنِي الْأَسْوَادُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخارى)

Artinya: “ telah berkata Al Aswad, dari Aisyah r.a bahwasannya Nabi Muhammad Saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan menggadaikan baju besinya (HR. Bukhari)¹⁰⁴

3) Ijma’:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰⁵

Tidak semua harta benda diperbolehkan untuk dijadikan objek transaksi dalam jual beli, yakni harta benda yang menjadi kepemilikan bersama atau publik tidak boleh sebagai objek transaksi jual beli. Sebagian *Qaum* (ulama) berpendapat bahwa, perkara air, *al kala*, dan api

¹⁰³ Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Terj.), Surabaya : CV. Karya Utama, 2012), h. 154

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 156.

¹⁰⁵ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*..., h 74-75.

tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu dan tidak sah untuk diperjualbelikan secara mutlak. Pendapat yang masyur di kalangan ulama, yang dimaksud dengan *al kala* ialah rumput yang diperbolehkan tumbuh di atas tanah yang tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu, maksud dari air diantaranya: mata air, sumber air, air sungai, yang tidak dimiliki oleh orang tertentu. (Air tersebut tidak berada di tanah atau lahan yang dimiliki orang secara sah). Maksud api ialah api bakar.¹⁰⁶

f. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

1) Penjual

Yaitu, pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

2) Pembeli

Yaitu, orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

3) Barang jualan

Yaitu, sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

¹⁰⁶ Muhammad Bin Abdul Hadi As Sindi, *Kifayah Al Hajat Fi Syarh Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1138 H), Juz II, h. 91.

4) Sighat (*Ijab Qabul*)

Yaitu, persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah teima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.¹⁰⁷

d. Syarat Jual Beli

1) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2) Obyek jual beli

a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).

b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

c) Barang yang akan diperjualbelikan merupakan barang berwujud.

d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

3) Harga

a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.

b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

¹⁰⁷ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h 112.

- c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.¹⁰⁸

e. Macam – Macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:¹⁰⁹
 - a) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- 2) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
 - a) Jual beli yang menguntungkan (*Al- Murabahah*)
 - b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*tauliyah*)
 - c) Jual beli rugi (*Al –Khasarah*)
 - d) Jual beli *al- Musawanah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

¹⁰⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 136-138.

¹⁰⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 101.

3) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

- a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - (1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - (2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.¹¹⁰

Dalam pendapat lain, jumhur fuqaha membagi jual beli kepada shahih dan bathil, yaitu:

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan

¹¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 174.

khiyar lagi,¹¹¹ maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.¹¹²

2) Jual Beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, yaitu:¹¹³

a). Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.

Jual beli *bathil* ini ada beberapa macam, yakni:¹¹⁴

(1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad,

¹¹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 121.

¹¹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dala Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128.

¹¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah.....*, h. 71.

¹¹⁴*Ibid*, h. 71- 72

misalnya memperjual belikan buah- buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang bathil.

(2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan

Para ulama baik dari kalangan Hanfiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara dan ikan di laut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang *bathil*.

(3) Jual beli *gharar*, kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open ended* mengandung unsur *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.¹¹⁵

¹¹⁵Efa Rodiah Nur, “ Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern “, *Jurnal Al Adalah*. vol.12, No 1 2015, (Bandar Lampung : Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016, h. 656 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> (10 September 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

(4) Jual beli najis dan benda –benda najis

Para ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah, dan sperma, karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap mal (harta).¹¹⁶

(5) Jual beli *urbun* (*porsekot*),

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.

(6) Jual beli air

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda – benda yang dimiliki secara bersamaan oleh seluruh manusia, seperti air, udara, tanah. Seluruh air seperti air laut, sungai, dan sumur tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong *mal mubah*.

Larangan ini tidak berlaku jika *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al- mubahat* atau *isti'la' ala al-mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan

¹¹⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 74-77.

di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah air untuk dijadikan air minum. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.¹¹⁷

- b). Jual Beli Fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas, (*ahliyah*) atau jual beli yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.¹¹⁸

f. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:¹¹⁹

1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

a) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah.

Begitupula sejenisnya, seperti orang mabuk, *sakalor*, dll.

¹¹⁷Rozalinda *Fikih Ekonomi Syariah*...., h. 79.

¹¹⁸*Ibid*, h. 80.

¹¹⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h 93.

b) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka beralasan untuk melatih kedewasaan dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli. dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (Q.S. An-Nisa: (4) : 6).

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat. adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa merupakan jual beli yang ditangguhkan. oleh karena itu,

keabsahannya ditangguhkan sampai rela. menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.¹²⁰

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan *zalim*.

2) Terlarang sebab *sighat*

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak

¹²⁰ *Ibid*, h. 95.

memakai *ijab-qabul*. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada *ijab* dari salah satunya.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan.

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Apabila tidak dapat dipahami atau tulisannya tidak jelas maka akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab qabul*

Jual beli tidak bersesuaian dengan *ijab qabul*, maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijab* dari pihak penjual dengan *qabul* dari pihak pembeli. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan

harga, menurut ulama Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah dianggap *fasid*, dan batal menurut jumhur ulama.¹²¹

3) Terlarang sebab *Ma'uqud 'Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'uqud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'uqud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Masalah yang disepakati ulama yang diperselisihkan diantaranya:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada adalah tidak sah.

¹²¹*Ibid*, h. 97.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'.

c) Jual beli *gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli susu yang masih ada di ibunya, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih ada di dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَارٍ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِي

Artinya: Bersumber dari Abi Hurairah: “ Sesungguhnya Nabi

S.A.W. melarang jual beli dengan cara lemparan dan jual

beli secara *gharar*.” (HR. Jama'ah kecuali Imam

Bukhari).¹²²

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

- (1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya menjual janin yang masih di dalam perut

¹²² Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 465.

binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lainnya adalah menjual ikan yang masih ada di dalam air (tambak).

(2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal.

(3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda

yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.

(4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang dijual.

Misalnya “ Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda” tanpa menentukan ciri-ciri benda tersebut secara tegas. Contoh lainnya misalnya menjual buah-buahan yang masih belum layak dikonsumsi.

(5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.

Misalnya orang berkata: “ saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras juga bermacam-macam dan harganya juga tidak sama.

(6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.

Misalnya: setelah seseorang meninggal, jual beli semacam ini termasuk gharar, karena objek akad dipandang belum ada.

- (7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Namun sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
- (8) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya: salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Termasuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya.
- (9) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya: menjual kuda pacu yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual beli gharar karena antar penjual dan pembeli berspekulasi dalam jual beli ini.

d) Jual beli barang yang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama Malikiyah memperbolehkannya setelah dibersihkan.

e) Jual beli yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur, batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

f) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap, dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

g) Jual beli buah-buahan atau sayuran

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.¹²³

4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat jika jual beli memenuhi rukun dan syarat nya maka jual beli tersebut sah. Namun ada beberapa masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut:

a) Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riba *fadhli* fasid menurut ulama Hanafiyah, namun batal menurut para jumhur ulama.

¹²³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h 99.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim.

c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yaitu mencegat (menghentikan) pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Jika barang hasil pencegatan tersebut dijual kembali dan orang yang membelinya mengetahui bahwa itu barang hasil pencegatan maka, hukumnya haram. Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahui adalah hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu *makruh tahrim*, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh khiiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.

d) Jual beli waktu azan Jum'at

Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, beliau menghukuminya dengan *makruh tahrim*. Sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika *khatib* sudah berada di mimbar.

e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah *zahirnya shahih*, tetapi *makruh*, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g) Jual beli barang yang sudah dibeli oranglain

Yaitu seseorang yang telah sepakat akan membeli sesuatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

h) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, misalnya “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak ini dijahit dahulu.” Begitupula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salahsatu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang akad.¹²⁴

¹²⁴*Ibid*, h. 99-101.

3. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar* dan Dasar Hukum *Gharar*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.¹²⁵

Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.¹²⁶ Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

b. Macam-Macam *Gharar*

Lebih jauh mengenai *gharar*, maka *gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqd* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

1) *Gharar* dalam *sighat aqd*

Gharar pada *sighat* yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah

¹²⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 97.

¹²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147.

pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *gharar* sighat dibagi menjadi:

- a) Dua jual beli dalam satu jual beli
- b) Jual beli *urbun*
- c) Jual beli *munabazah*
- d) Jual beli *hasah*
- e) Jual beli *mulamasah*
- f) Akad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan.¹²⁷

2) *Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*.

Gharar dalam benda yang berlaku pada *aqadnya* yaitu:¹²⁸

- a) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- b) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- c) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan

¹²⁷ Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, Semarang: Toha Putra 2011, h. 111.

¹²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Arh wa Istidlal juz III dan IV*, JAKARTA: Penerbit Lentera, 2009, h. 158.

- d) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- e) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- f) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- g) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksi
- h) Transaksi pada benda yang tidak ada
- i) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.

c. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *Gharar* yang dilarang ada 10 macam, yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat atau kualitas barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika Zaed datang”.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang.

Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

- j. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempari bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.

4. Konsep Dasar Hukum *Taklifi* dan *Wad'i*

a. Pengertian Umum

Mayoritas ulama ushul Fiqh mendefinisikan hukum sebagai berikut: “*Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperative, fakultif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang*”. Kemudian, yang dimaksud *Khitob Allah* dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur'an, As-Sunnah maupun yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun *ijma'* dan *qiyas* hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Yang dimaksud perbuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan, seperti *ghibah* (menggunjing) dan *namimah* (mengadu-domba).¹²⁹

b. Pembagian Hukum

Bertitik dari latar belakang hukum di atas, maka hukum menurut ulama ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum *taklifi* dan *wad'i*.

¹²⁹Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-IV, 2010, h. 295.

1) Hukum *Taklifi* (Pembebanan)

Hukum *taklifi* ialah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Misalnya, hukum sholat, membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan contoh yang bersifat memilih (*fakultatif*) adalah makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.¹³⁰

Terkait bentuk-bentuk hukum *taklifi* terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum *taklifi*. Pertama, bentuk-bentuk hukum *taklifi* menurut jumhur ulama Ushul Fiqh atau *mutakalimin*. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, yaitu *ijab*, *nadb*, *ibahah*, *karahah* (makruh), dan *tahrim*. Kedua, bentuk-bentuk hukum *taklifi* seperti *iftirad*, *ijab*, *nabd*, *ibahah*, *karahah tanzhiliyah*, *karahah tahrimiyyah*, dan *tahrim*.

a) *Ijab* atau Wajib

Ijab adalah suatu tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi. Sesuatu yang wajib tersebut pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan azab.¹³¹

¹³⁰*Ibid*, h. 297.

¹³¹Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul* Penj. Abu Shilah dkk, (t.tp: 2007), h. 8.

b) *Nadb* atau Sunnah

Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman.¹³²

Suatu yang *nadb* itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab.

c) *Ibahah* atau Mubah

Khitab Allah yang bersifat *fakultatif* megandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari *khitab* Allah ini disebut juga dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah*. Kata *mubah* memiliki nama lain halal dan jaiz. Mubah atau *ibahah* senantiasa berada pada sifat mubah (boleh), maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula azab.¹³³

d) *Karahah*

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang bersifat memaksa. Dan tidak dikenai hukuman. *Karahah* atau makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan azab.¹³⁴

¹³²Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., h. 298.

¹³³ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, ..., h. 9

¹³⁴ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, ..., h. 11.

e) *Tahrim*

Tuntutan untuk tidak mengejakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut *hurmah* dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan azab.¹³⁵

Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan *khitab tasyri'*, seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mandub.¹³⁶

2) Hukum *Wad'i*

Hukum *wad'i* adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum *taklifi*, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum *wad'i*. Di dalam ilmu hukum disebut pertimbangan hukum. Macam-macam hukum *wad'i* yaitu sebagai berikut:

a) Sebab

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan *syar'i* sebagai adanya hukum.

¹³⁵ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul*, ..., h. 10.

¹³⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., h. 302.

b) Syarat

Sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum *syara'* bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum *syara'*. Oleh sebab itu, suatu hukum *taklifi* tidak dapat diterapkan kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara'. Misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.¹³⁷

c) *Man'i* (Penghalang)

Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan. Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut.¹³⁸

d) *Sihah*

Hukum yang sesuai dengan tuntutan *syara'*. Yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada *man'i*. Misalnya, mengerjakan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya

¹³⁷Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., h. 314.

¹³⁸ *Ibid*, h. 314.

(tidak haid, nifas, dan lain sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun *man'i* nya tidak ada.¹³⁹

e) Batal (Tidak Sah)

Terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjualbelikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak dinilai harta dalam pandangan syara'.

f.) '*Azimah* dan *Rukhsah*

'*Azimah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh *mukallaf* wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah empat rakaat disebut dengan '*azimah*. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut *rukhsah*. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan *rukhsah* dengan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada *udzhur*.¹⁴⁰

¹³⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,h. 315.

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 316.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan judul tentang jual beli air, sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Rizki Eka Prasetyo tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul : “Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Rumusan Masalah: Bagaimana praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul dalam tinjauan Hukum Islam? Hasil Penelitian: Dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari segi subyek jual beli (*'Aqidani*) jual beli air dari sumber umum itu diperbolehkan karena yang melakukan jual beli ini orang dewasa yang sudah *mumayyiz* serta tidak ada paksaan dalam jual beli tersebut. Dari segi akad transaksi jual beli (*sighat*) jual beli air dari sumber mata air umum diperbolehkan karena sudah termasuk akad transaksi yang diperbolehkan yaitu dengan cara lisan yang tidak mengakibatkan persengketaan dalam jual beli tersebut. Dari segi objek jual beli (*Ma' uqud 'Alaih*) jual beli air dari sumber mata air umum tidak diperbolehkan pada musim kemarau karena jumlah air terbatas yang menyebabkan air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang mengalami kekeringan dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengambil air dari sumber mata air tersebut. Maka untuk menjual belikan air dari sumber mata air untuk umum yang sangat terbatas di musim kemarau tidak diperbolehkan, karena merugikan

masyarakat pengguna air lainnya di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul untuk memperoleh sumber mata air umum.¹⁴¹ Yang menjadi perbandingan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis buat yaitu dalam skripsi penulis, kepemilikan dalam jual beli air dari sumber umum merupakan milik bersama dimana masyarakat berhak mengambil secara umum tanpa paksaan.

2. Skripsi yang dibuat oleh M. Adib Mubarak tahun 2009 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “ Praktik Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)”. Rumusan Masalah: 1). Bagaimana akad jual beli Sumber Air di Desa Ngaditirto? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad Jual Beli sumber air di Desa Ngaditirto? Hasil Penelitian: Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad yang digunakan di dalam praktek jual beli sumber air di Desa Ngaditirto adalah akad jual beli bersyarat, yaitu jual beli tanah dengan syarat sumber air yang ada pada lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli secara mutlak. Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, maka jual beli sumber air yang merupakan hak publik jelas dilarang oleh nabi. Air merupakan kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya, dan dikelola secara bersamaan. Akad jual

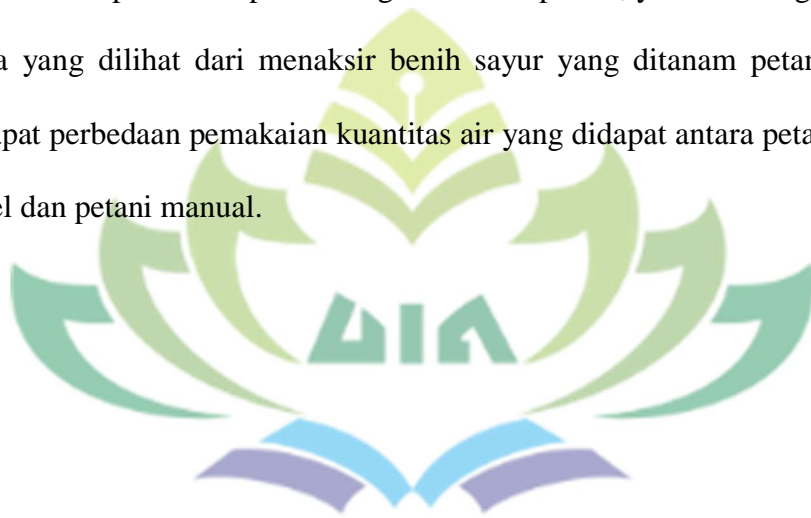
¹⁴¹Rizki Eka Prasetyo, “*Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam.*” (Skripsi Program Sarjana Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, h. 72.

beli di Desa Ngaditirto belum sesuai dengan aturan syar'i Islami karena tidak menghiraukan warga lain yang membutuhkan air tersebut. Apabila ditinjau dari cara mendapatkan air, usaha yang dilakukan pembeli air juga dari tujuannya maka jual beli sumber air seperti ini menurut penulis sah demi hukum. Kesimpulan ini dengan pertimbangan bahwa hukum Islam bersifat elastis, dimana variabel dengan jual beli sumber air, jika dilihat segi tujuan dan manfaatnya maka praktek jual beli sumber ini bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam.¹⁴² Yang menjadi perbandingan antara skripsi di atas dengan skripsi yang penulis buat yaitu yang dijadikan objek jual beli air dimana air tersebut berada di tanah yang transaksinya di bawah tangan. Dan masyarakat sekitar dilarang mengambil air tersebut.

3. Skripsi yang dibuat oleh Yazied tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian”. Rumusan masalah: 1). Bagaimana sistem penetapan harga jual beli air irigasi yang dilakukan di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga air irigasi di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? Hasil penelitian: Penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli air irigasi di Desa Karangasem diperbolehkan karena syarat dan rukun telah terpenuhi, sedangkan mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan memakai

¹⁴² M. Abid Mubarak, “ *Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009) h. 68.

kuantitas air yang didapat antara petani memakai diesel dan petani manual. *Ma'fhum Mukholafah* dari pernyataan tersebut adalah penetapan harga air yang diperbolehkan selama ada cara untuk menaksirnya. Namun demikian patokan di masyarakat yang menaksir benih sayur yang ditanam sepersekian menghasilkan hasil yang sepersekian menjadikan penetapan harga tersebut boleh, selain itu dalam Islam terdapat praktek *ijaroh* yaitu penukaran manfaat barang antara penyedia jasa dan pemakai jasa yang mana pemakai jasa dikenal konskuensi membayar *ujroh* kepada penyedia jasa.¹⁴³ Dari tinjauan pustaka di atas, maka dapat dibuat perbandingan dari skripsi ini, yaitu dari segi penetapan harga yang dilihat dari menaksir benih sayur yang ditanam petani sehingga terdapat perbedaan pemakaian kuantitas air yang didapat antara petani memakai diesel dan petani manual.



¹⁴³Yazied, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian* (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam Negei Walisongo, 2017), h. 76.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Bukit Kemuning

Sehubungan dengan telah dibangunnya jalan raya pada tahun 1930 yang menghubungkan antara keresidenan Lampung dengan keresidenan Palembang dan Bengkulu. Pemerintah memandang perlu ada titik persimpangan jalan raya tersebut untuk dibangun satu desa, yang oleh Kepala (Pesirah) rombongan sepuluh almarhum antara lain Hi. Abdulrahman dan menunjuk seorang penggarap lahan yaitu Hi. Kontar dengan rekan-rekannya sebagai pelopor pembangunan desa.

Pada saat pendirian desa, status pemerintah masih bergabung dengan Desa Ulak Rengas pada tahun 1938 telah diakui dan disahkan oleh pemerintah dengan status kampung dan diangkatlah Hi. Kontar sebagai Kepala Kampung. Setelah ditetapkan lokasi pada waktu mengerjakan jalan memasuki desa, maka ditemukan sebuah bukit yang di atasnya terdapat pohon kemuning (tepatnya di depan rumah Bapak Mantri Hamid mantan Dinas Kesehatan). Maka timbullah pemikiran untuk memberi nama kampung/desa yang baru ini bernama Bukit Kemuning. Dengan persetujuan pemerintah Jepang pada tahun 1944 dibentuklah Kecamatan Bukit Kemuning yang meliputi Rebang Seputih yang ibukotanya di desa Bukit Kemuning yang dikepalai oleh seorang *Fuku Chunnoho* (istilah Jepang) setara dengan Camat. Pada tahun 1954 Marga

Rebang Seputih dibentuk kembali menjadi Negeri Semendo Abung yang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri yang bernama Abu Bakar Sidiq.

Kemudian pada tahun 1958 sampai tahun 1962 diganti oleh Aziz Kontar sampai pembubaran kenegarian pada tahun 1974. Semula Kecamatan Bukit Kemuning berjumlah 9 desa, dan selanjutnya pada tahun 1972, mengadakan pemekaran sehingga menjadi 18 (delapan belas) desa/kampung dan dimekarkan kembali menjadi dua kecamatan, yaitu : Kecamatan Bukit Kemuning dan Kecamatan Tanjung Raja, dan pada tahun 2001 Kecamatan Bukit Kemuning dimekarkan kembali yaitu Kecamatan Abung Tinggi (Kecamatan Bukit Kemuning sebagai Kecamatan Induk terdiri dari 7 desa 1 Kelurahan).

Kelurahan Bukit Kemuning merupakan wilayah yang bernaung di bawah Kecamatan Bukit Kemuning. Kelurahan dikepalai oleh seorang Lurah yang diangkat oleh Kepala Daerah. Lurah bertugas melaksanakan kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, kesejahteraan, kependudukan, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tugas politik dan fungsinya (TUPOKSI) Berdasarkan surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 51 Tahun 2002 Lurah dibantu oleh Sekretaris Lurah dan 4 Kepala seksi (kasi), yaitu kasi pemerintahan, kasi pembangunan, kasi pelayanan umum, dan kasi kesejahteraan rakyat. Selain itu, guna memperlancar roda pemerintahan maka Lurah diberikan kewenangan untuk mengangkat

ataupun memfasilitasi pembentukan perangkat organisasi di bawah kelurahan, yaitu kepala lingkungan dan ketua RT/RW. ¹

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara adalah 13.129 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data tabel berikut:

Tabel I:
Jumlah Penduduk Kelurahan Bukit Kemuning

Lingkungan	RT	Jumlah KK	Laki laki	Perempuan	Jumlah
I	1	50	96	95	191
	2	120	218	221	439
	3	115	213	216	429
	4	133	222	223	445
Jumlah		418	749	755	1.504
II	1	218	108	116	224
	2	133	226	236	462
	3	76	156	153	309
	4	160	296	295	591
	5	160	296	351	647
Jumlah		747	1.082	1.151	2.233
III	1	81	76	86	162

¹ Data Penelitian, Juli 2020.

	2	81	130	185	315
	3	94	143	182	325
	4	114	150	180	330
Jumlah		370	499	633	1132
IV	1	85	121	146	267
	2	64	112	136	248
	3	55	119	106	225
	4	66	130	127	257
Jumlah		270	482	515	997
V	1	152	270	283	553
	2	167	264	153	417
	3	172	157	297	454
	4	48	60	50	110
Jumlah		539	751	783	1534
VI	1	115	233	236	469
	2	124	215	198	413
	3	128	218	242	460
	4	107	197	203	400
Jumlah		474	863	879	1742
VII	1	96	143	181	324
	2	89	172	187	359
	3	126	222	311	533

Jumlah		311	537	679	1216
VIII	1	90	150	130	280
	2	105	185	182	367
	3	110	170	130	300
Jumlah		305	505	442	947
IX	1	92	173	99	272
	2	104	182	204	386
	3	74	141	146	287
Jumlah		270	496	449	945
X	1	64	128	115	243
	2	47	95	82	177
	3	26	64	78	142
Jumlah		137	287	275	562
XI	1	78	128	113	241
	2	25	46	35	81
Jumlah		103	174	143	322

Sumber: Data Penelitian Kelurahan Bukit Kemuning tahun 2020.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk, jumlah laki laki dan perempuan, jumlah KK di Kelurahan Bukit Kemuning, yaitu:

Jumlah Penduduk: 13.129 jiwa

Jumlah KK: 3.944 KK

Laki Laki: 6.425 jiwa

Perempuan: 6.704 jiwa

3. Kondisi Geografis Desa Bukit Kemuning

Secara geografis Kelurahan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang terletak di jalur lintas Sumatera dengan posisi 140° dan 445° LS luas wilayah kurang lebih 17,0 km dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Muara Aman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Sukamenanti
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Baru Timur
4. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Way Kanan.

Luas wilayah Kelurahan Bukit Kemuning :

1. Luas Pemukiman 8,4 km
2. Luas Perkebunan 4 km
3. Luas Pekarangan 4,95 km
4. Luas Taman 0,5 km
5. Luas Perkantoran 1,2 km
6. Luas Prasarana Umum lainnya 2,0 km

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Kecamatan Bukit Kemuning 80% adalah dataran tinggi dan sedang, dimana kondisi ini dimanfaatkan oleh mayoritas penduduk untuk lahan perkebunan dan pertanian. Selebihnya adalah persawahan dan budidaya ikan tawar serta perdagangan dan home industri.

a. Pertanian/Perkebunan

Masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning pada umumnya terutama yang berada di wilayah pedesaan adalah bertani dan berkebun, baik itu ladang, sawah, sayur mayur, kebun kopi, kakau dan karet.

b. Peternakan/ perikanan

Untuk menopang pendapatan keluarga, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan, masyarakat Kecamatan Bukit Kemuning juga beternak baik itu kambing, sapi dan kerbau, demikian juga di sektor perikanan terutama di daerah areal persawahan juga dilakukan secara tumpang sari secara bersamaan beternak ikan dan sawah serta ada pula yang secara khusus usaha tambak ikan yang berdekatan dengan lokasi sawah. Namun hal ini belum terkelola secara maksimal karena perlunya pendampingan tenaga ahli baik dalam hal pembiakan ternak maupun pemijahan ikan.

c. Perindustrian

Khusus untuk industri hanya terdapat beberapa pengrajin rumah tangga (home industri). Dan masyarakat pengrajin tersebut sebagian telah menerima pembinaan baik yang difasilitasi oleh Dinas Koperindag maupun Badan PMPD Provinsi / Kabupaten. Adapun home industri yang bergerak di Kecamatan Bukit kemuning diantaranya adalah : gilingan padi, industri tahu, tempe, jamur tiram, pembuatan arang, bata dan batako. Selebihnya adalah bergerak dibidang perdagangan, pertukangan dan tenaga kerja buruh. Mayoritas utama mata pencaharian di Kelurahan Bukit Kemuning adalah petani.

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari sisi keimanan dan ketaqwaan sangat diperlukan dalam menuju keberhasilan pembangunan, untuk itu di Kecamatan Bukit Kemuning sejak dahulu telah terjalin kerukunan umat beragama dan saling memiliki toleransi, hormat menghormati satu sama lain.

Sebagai gambaran macam macam agama yang ada di Kelurahan Bukit Kemuning, antara lain:

Tabel II:

Pemeluk Agama di Kelurahan Bukit Kemuning

NO.	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	12.924
2.	Kristen	190
3.	Katholik	15
4.	Hindu	0
5.	Budha	0

Sumber: Data Penelitian tahun 2020

Sedangkan jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Bukit Kemuning seperti tabel berikut ini :

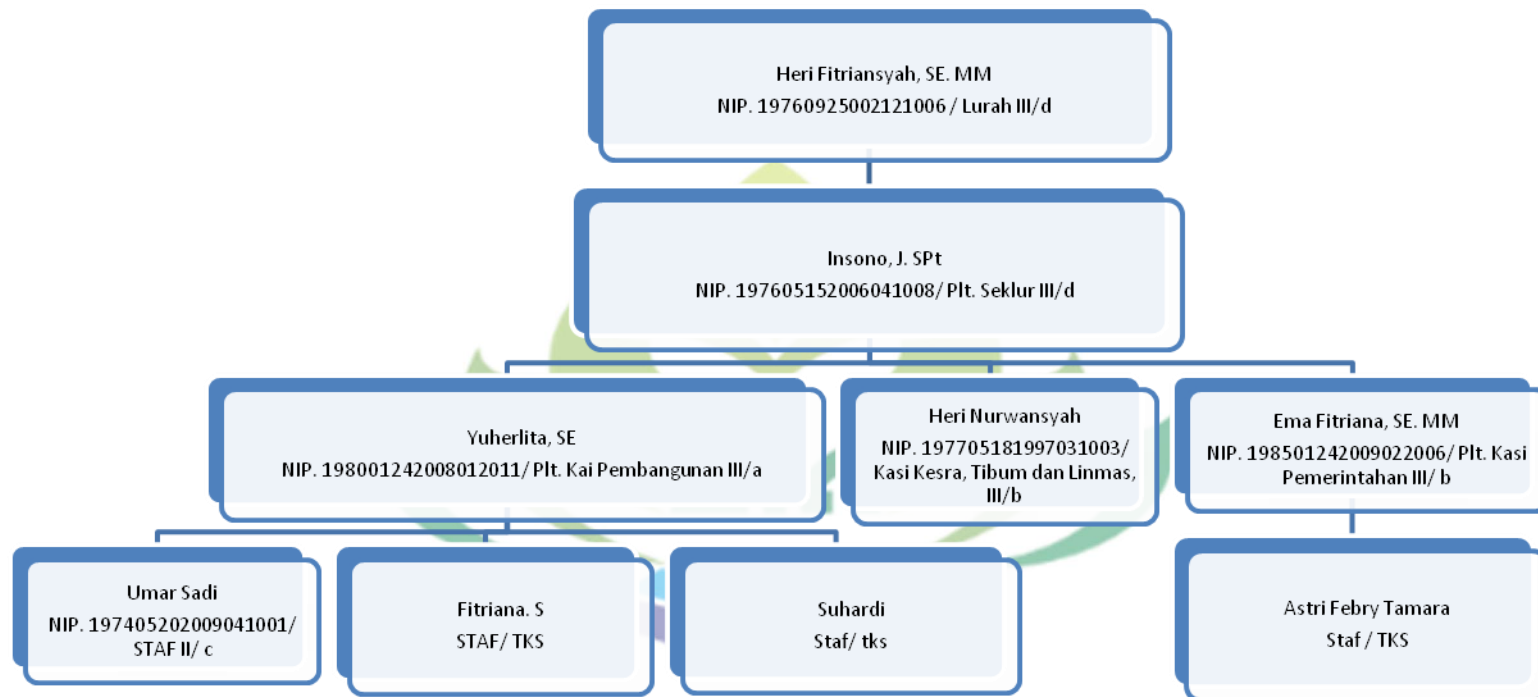
Tabel III:

Rumah Ibadah di Kecamatan Bukit Kemuning

NO.	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid + surau	12
2.	Gereja	2
3.	Pure	0
4.	Wihara	0

Sumber: Data Penelitian Kelurahan Bukit Kemuning tahun 2020..

f. Struktur Organisasi Kelurahan Bukit Kemuning



Sumber: Data Penelitian Kelurahan Bukit Kemuning tahun 2020.

B. Pelaksanaan Jual Beli Air dengan Standar Waktu

Kelurahan Bukit Kemuning adalah sebuah Kelurahan yang berada di Kecamatan Bukit Kemuning. Mayoritas pekerjaan masyarakat Kelurahan Bukit Kemuning adalah petani, namun sebagian besar juga bekerja sebagai pedagang. Salah satunya adalah sebagai penjual air bersih. Jual beli adalah sistem yang melibatkan kedua belah pihak yang dimana kedua belah tersebut dinamakan penjual dan pembeli.

Penjual adalah orang yang memiliki barang dagangan yang ditawarkan kepada pembeli, sedangkan pembeli adalah orang yang akan menawar atau membeli barang milik si penjual. Praktek jual beli air yang terjadi di Kelurahan Bukit Kemuning merupakan hal yang sudah biasa bagi seluruh masyarakat, namun jual beli dengan standar waktu masih sangatlah tabu.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli air dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Maka proses yang dilakukan ketika jual beli air standar waktu yaitu:

1. Pelaksanaan Akad

Berbagai macam cara dalam melakukan proses jual beli air. Salah satunya adalah dengan jual beli air dengan standar waktu. Dalam jual beli air dengan standar waktu, akad yang digunakan adalah akad secara langsung yang dilakukan penjual dan pembeli di rumah penjual air langsung.² Akad yang digunakan yaitu akad secara langsung yang dilakukan secara lisan. Penjual dan

²Ibu Wati, *Wawancara dengan Pembeli*, Bukit Kemuning, 26 Juli 2020.

pembeli melakukan negosiasi bersama untuk mendapatkan kesepakatan yang baik dan sesuai. Kesepakatan dilakukan di rumah penjual air. Jual beli air dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan standar waktu yang dialirkan langsung ke rumah pembeli atau dengan menggunakan drigen minyak yang bisa diambil sendiri. Jika sudah selesai melakukan proses pengisian langsung membayar.³

2. Proses Pembelian Air

Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka terjadilah proses pengaliran air. Proses pengaliran air dilakukan di rumah penjual air.⁴ Namun penjual air tidak memaksakan harus membeli dengan waktu selama 45 menit, karena warga sekitar juga diperbolehkan untuk membeli air menggunakan drigen minyak besar.⁵

Warga yang membutuhkan air dalam jumlah banyak, untuk kebutuhan sehari-hari biasanya membeli dengan menggunakan standar waktu. Warga tidak keberatan jika harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus. Jika dihitung akan lebih irit jika membeli air dengan ukuran yang menggunakan standar waktu. Selain lebih irit, pembeli juga tidak perlu kesulitan untuk mengangkat air.

Pelaksanaan jual beli air dengan standar waktu biasanya menggunakan selang yang dialiri secara langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Penjual memantau waktu proses pembelian air dari rumah penjual sendiri. Semakin jauh jarak rumah penjual dengan pembeli, maka

³Ibu Rasimah, *Wawancara dengan Pembeli*, Bukit Kemuning, 12 Juli 2020.

⁴Bapak Rian, *Wawancara dengan Pembeli*, Bukit Kemuning, 26 Juli 2020.

⁵Ibu Enita, *Wawancara dengan Pembeli*, Bukit Kemuning, 26 Juli 2020.

intensitas air yang didapatkan semakin sedikit. Namun semakin dekat jarak rumah antara penjual dengan pembeli, maka intensitas air yang didapatkan lebih banyak.. Dengan banyaknya air yang didapatkan, pembeli merasa kesulitan untuk wadah penampungan air yang harus digunakan, karena tidak semua masyarakat memiliki wadah besar.

Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan cara mengambil sendiri air nya di rumah penjual. Warga yang membutuhkan hanya untuk kebutuhan memasak, biasanya warga membeli air dengan ukuran drigen minyak besar. Untuk air yang dibeli menggunakan drigen dipatok dengan harga Rp 2.000,00 untuk 1 derigen penuh.⁶ Derigen yang digunakan adalah milik pembeli sendiri, dan air diambil sendiri, tidak menggunakan selang. Pelaksanaan jual beli air di Kelurahan Bukit Kemuning yang dilakukan penjual yaitu menggunakan sumur bor milik pribadi di rumahnya. Selain digunakan untuk proses jual beli, pemilik air memiliki keinginan untuk membantu masyarakat yang kekurangan air. Hal ini sudah menjadi rutinitas saat musim kemarau.

Transaksi jual beli standar waktu ini merupakan transaksi yang biasa digunakan oleh masyarakat Kelurahan Bukit Kemuning karena perjanjiannya yang terbilang mudah, tidak ribet, dan mudah dilakukan. Tidak ada takaran ukuran jauh rumah si pembeli. Semua rumah disamakan harga dan ukuran waktunya tidak ada yang dibedakan. Saat proses jual beli air antara penjual dan

⁶Bapak Yudi, *Wawancara dengan Penjual*, Bukit Kemuning, 13 Juli 2020.

pembeli saling percaya, jadi tidak perlu lagi di ukur seberapa banyak air yang di keluarkan.⁷

Pompa air yang digunakan adalah milik penjual itu sendiri. Pompa air tidak ada spesifikasi khusus, tetapi sudah pasti dengan tarikan air yang kencang supaya tidak merugikan pihak pembeli.

3. Proses Pengaliran

Pengaliran air yang dilakukan dalam jual beli standar waktu tersebut dimulai sejak penjual menghidupkan mesin untuk dialiri ke pembeli. Dimulainya bukan saat air sampai di rumah pembeli, tetapi sejak pembeli menghidupkan mesin air. Proses ini tidak disesuaikan waktunya antara penjual dan pembeli air tersebut. Waktu dihitung sejak pembeli menghidupkan mesin di rumahnya. Jarak rumah antara penjual dan pembeli berbeda beda. Jarak terdekat sekitar 15m, dan jarak terjauh hingga mencapai 300m. Dengan jauhnya jarak yang ditempuh, maka kuantitas air yang didapatkan pun berbeda-beda. Jumlah air yang didapatkan masing-masing pembeli tergantung dengan jarak rumah. Misalnya untuk rumah yang berjarak hanya 20m bisa mendapatkan air kira-kira 1000liter. Sedangkan rumah yang berjarak 200 m atau lebih bisa mendapatkan air kira-kira 500 liter.⁸ Proses pengaliran menggunakan selang panjang yang disediakan oleh penjual, jika selang tidak mencapai rumah pembeli, maka para pembeli menyiapkan selang lain untuk disambungkan menuju rumahnya.

⁷Bapak Safarudin, *Wawancara dengan Pembeli*, 20 Juli 2020.

⁸Bapak Rian, *Wawancara dengan Pembeli*, 20 Juli 2020.

4. Waktu transaksi

Proses transaksi dilakukan sebelum melakukan proses pengaliran air dimulai. Proses tersebut dilakukan di rumah penjual air. Jika sudah sepakat antara kedua belah pihak, maka terjadilah proses pengaliran air. Setelah proses pengaliran air selesai, penjual dan pembeli melakukan proses transaksi yang telah disepakati di awal akad. Transaksi dilakukan di rumah penjual. Sesuai kesepakatan, transaksi dilakukan setelah selesai proses pengaliran dengan harga yang telah disepakati di awal.

5. Faktor terjadinya proses jual beli air

Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan proses jual beli dikarenakan faktor kebutuhan sehari-hari yang membutuhkan air dalam ukuran yang banyak, atau lebih tepatnya kekurangan air saat musim kemarau. Jika musim kemarau tiba, masyarakat akan mengalami kekurangan air dan akan membeli air. Masyarakat sebenarnya memiliki sumur, namun jika sudah musim kemarau, sumur yang masyarakat miliki tidak dapat diandalkan karena sumur tersebut pasti mengalami kekeringan. Jika sudah mulai kering, air yang ditimba pun menjadi kotor. Jadi jika ingin menggunakan air tersebut harus diendapkan terlebih dahulu supaya mendapatkan air yang bersih. Terutama untuk memasak. Maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan air bersih. Awalnya penjual air merasa kasihan dengan warga sekitar karena melihat warga yang kekurangan air, maka penjual memiliki inisiatif untuk menjual air yang

dimiliki dari sumur bor miliknya.⁹ Proses jual beli air dengan sistem waktu ini sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu.

Tabel IV:

Daftar Harga Air dalam Menit di Kelurahan Bukit Kemuning

NO.	Waktu	Harga (Rp)
1.	45 menit	Rp 20.000
2	30 menit	Rp 15.000
3.	20 menit	Rp 10.000
4.	15 menit	Rp 7.000
5.	10 menit	Rp 4.000
6.	5 menit	Rp 2.000

Sumber: Data dari Wawancara dengan Penjual, 12 Juli 2020

⁹ Pak Bangunawan, *Wawancara dengan Penjual*, Bukit Kemuning, 12 Juli 2020.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Praktek Jual Beli Air Standar Waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara

Sebagai manusia, pasti membutuhkan proses jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan jual beli sudah sangat mendarah daging di masyarakat. Masyarakat melakukan transaksi jual beli tidak hanya untuk melakukan kegiatan ekonomi saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, proses jual beli juga digunakan untuk mempererat tali silaturahmi antar manusia, karena dengan saling bertemu untuk bertransaksi masyarakat akan semakin dekat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa jual beli sendiri diartikan sebagai tukar menukar harta dengan barang yang bukan merupakan barang milik umum. Proses jual beli harus ada yang diuntungkan tetapi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Meskipun harga yang diperjualbelikan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, namun jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka boleh untuk dilakukan. Seperti yang telah tercantum di dalam rukun jual beli, yakni *Sighat* atau ijab dan *qabul* yaitu antara orang yang memberi dan menjual sudah membuat kesepakatan di awal.

Salah satu syarat barang dalam transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh orang tertentu. Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan. Barang yang akan diperjualbelikan merupakan barang berwujud. Dengan demikian tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air. Air adalah sumber kehidupan yang

sangat penting, maka dari itu tidak dapat dipungkiri semua manusia pasti sangat membutuhkan air dalam kehidupannya.

Musim kemarau merupakan musim kekeringan yang sangat membuat manusia kekurangan air. Suasana pun berubah jika sudah memasuki musim kemarau. Masyarakat diseluruh daerah pasti akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Tidak berbeda dengan daerah Kelurahan Bukit Kemuning. Kelurahan Bukit Kemuning dengan mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah sebagai petani dan penjual. Untuk bertani, menggunakan air yang cukup banyak, maka jika musim kemarau tiba petani kesulitan mendapatkan air. Tidak berbeda dengan kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga mengalami kesulitan air. Masyarakat Bukit Kemuning sehari-hari nya menggunakan air dari sumur milik pribadi, namun jika sudah musim kemarau tiba masyarakat akan kesulitan mendapatkan air karena sumur yang dimiliki kering dan sudah tidak bersih untuk digunakan sehari-hari. Musim kemarau selalu menjadi kendala untuk kehidupan sehari-hari karena kekurangan air. Maka dari itu terciptalah pikiran oleh penjual air untuk membuat sumur bor supaya dapat digunakan oleh pribadi nya sendiri dan untuk dapat diperjual belikan untuk tetangga sekitar. Jual beli air dengan standar waktu ini sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu.

Untuk proses jual beli dilakukan di rumah penjual, dan menggunakan sistem waktu, maksudnya dalam jual beli air tersebut membutuhkan waktu 45 menit dengan harga Rp 20.000,00. Semakin jauh jarak rumah penjual dengan pembeli, maka mempengaruhi kuantitas air yang berbeda beda. Ukuran sumur bor yang dimiliki oleh penjual mencapai hingga 90 meter².

Namun tidak ada paksaan dari pihak penjual harus membeli air dengan sistem waktu tersebut, karena penjual memberi kebebasan kepada pembeli untuk membeli air dengan menggunakan derigen air. Jual beli air standar waktu penyedotannya menggunakan pompa air dari penjual yang dialiri melalui selang hingga mencapai rumah pembeli. Jika selang yang dimiliki penjual tidak mencapai rumah pembeli tersebut, maka pembeli harus menambahkan selang yang dibutuhkan untuk mencapai ke rumahnya. Proses jual beli air dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara sudah berjalan sekitar 3 tahun yang lalu.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli air standar waktu adalah karena kebutuhan masyarakat sehari-hari yang membutuhkan banyak air. Karena air adalah sumber kehidupan manusia. Jika kekurangan air, manusia akan kekeringan. Berapapun harga air pasti akan dibeli supaya bisa mendapatkan air. Air sumur di rumahnya masih ada namun sudah sangat dalam, jika diambil harus di saring terlebih dahulu untuk mendapatkan air bersih. Maka dari itu masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya jual beli air dengan standar waktu. Selain itu masyarakat tertarik untuk membeli air standar waktu ini karena harga nya yang murah, mudah, unik dan dekat dengan wilayah sekitar.

Masyarakat menganggap air adalah sesuatu yang sangat berharga dan berguna. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak memperdulikan berapa harga yang harus dibayarkan untuk dapat memiliki air. Masyarakat sekitar dan penjual sudah saling sepakat untuk saling menguntungkan dan saling membantu. Masyarakat tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya jual beli tersebut.

Proses jual beli air standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning merupakan proses tolong menolong, selain itu juga di dalamnya terdapat suatu simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Pembeli diuntungkan karena merasa sangat terbantu dengan adanya penjual air yang menjual air dengan harga murah. Penjual pun merasa diuntungkan dengan para pembeli yang membeli air milik pembeli, yang dapat membantu perekonomian si pembeli. Selain itu juga karena ada faktor kerelaan dari pihak penjual, yang merelakan airnya untuk diperjualbelikan.

Dalam pelaksanaan proses jual beli air dengan standar waktu yang menggunakan selang dan air ditarik menggunakan pompa air. Cara tersebut memang efektif, namun selang yang digunakan kurang efektif karena hanya menggunakan selang yang dimasukkan dan tidak dikunci kuat. Jika sudah selesai digunakan, lalu digulung kembali supaya tidak rusak dan tidak disalahgunakan. Sebaiknya menggunakan paralon kunci yang ditanam di tanah supaya tidak rusak terinjak kendaraan dan supaya tidak sulit membuka pasang saat akan digunakan. Selain itu supaya pada saat mengalir tidak khawatir air akan tumpah. Jika terjadi hal seperti itu, maka akan merugikan pihak pembeli, tidak hanya pihak pembeli yang dirugikan, namun pihak penjual juga rugi karena air yang diekluarkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sistem jual beli yang dilakukan dalam jual beli air standar waktu adalah secara langsung mendatangi rumah penjual air. Jika selang atau pompa air sedang tidak digunakan maka akan langsung dialiri ke rumah yang memesan air. Namun jika sedang mengalir ke rumah warga yang lain, maka pembeli selanjutnya harus

menunggu dahulu sampai selesai. Akad yang digunakan pun menggunakan akad langsung secara lisan. Cara pembayaran nya berlangsung di rumah pembeli setelah selesai proses jual beli nya.

Semakin jauh rumah antara penjual dan pembeli sangat mempengaruhi kecepatan air yang dilalui. Meskipun kuantitas air yang didapatkan masing masing pembeli tidak sama, atau takarannya berbeda beda atau tidak jelas yang disebabkan oleh jarak rumah antara penjual dan pembeli, namun harga dalam waktu menit sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan atau persetujuan oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, rukun dalam jual beli sudah terpenuhi, namun syarat dalam jual beli belum terpenuhi, karena proses nya terjadi proses yang tidak halal (*gharar*) yakni ketidakjelasan air yang didapatkan oleh masing-masing pembeli. Transaksi jual beli air dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

B. Analisis Hukum Islam Jual Beli Standar Waktu

Di dalam kehidupan, air merupakan salah satu elemen terpenting di alam bumi dan semesta ini. Bukan hanya tumbuhan, hewan hingga manusia, semua elemen yang hidup di muka bumi ini sangat membutuhkan air di dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 10 sampai 14 hari. Namun, manusia hanya bisa bertahan tanpa air hanya 3 sampai 5 hari. Bisa disimpulkan bahwa adanya air bagi kehidupan kita sangatlah penting. Oleh karena itu, Maha Besar Allah telah memberikan air dan mengalirkannya ke bumi dengan segala manfaatnya.

Kita telah pahami bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk air. Dari air pula kita bisa hidup dan memenuhi kebutuhan supaya dapat bertahan hidup. Namun masihkah kita untuk tidak taat dan beriman kepada Allah. Sungguh merugi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah.

Jual beli air memang diperbolehkan asalkan air itu termasuk *mal mubah* (benda-benda bebas) yang telah dilakukan *ihraz al mubahat* atau *isti'la 'ala al mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda-benda tersebut boleh untuk dijual.

Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang jual beli air standar waktu. Dalam konteks ini, air yang digunakan untuk jual beli merupakan air milik pribadi yang di ambil dari sumur bor. Dalam hal ini, hak air merupakan hak dari pemilik air, maka air boleh untuk dijual dan digunakan dengan izin dari pemilik air.

Jual beli air standar waktu harus sesuai dengan Syariat Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat. Secara rukun jual beli air standar waktu telah memenuhi rukun dalam jual beli karena di dalamnya terdapat penjual dan pembeli, ada objek jual beli yaitu air sumur bor yang suci, bersih, dan halal, pembeli mengetahui meski hanya dari ciri-cirinya, dan barang dapat diserahkan, kemudian *sighat* atau *ijab qabul* (kesepakatan kedua belah pihak) yang saling rela.

Jika melihat kriteria syarat jual beli di atas, dalam jual beli air dengan standar waktu menggunakan sumur bor, adalah sumur bor milik sendiri, dapat

diserahterimakan airnya, air adalah benda yang diperbolehkan syariat dan bermanfaat. Sedangkan untuk syarat benda jelas, sifat, ukuran dan jenisnya untuk jual beli air dengan standar waktu ini belum sesuai dengan syarat karena kuantitas air yang didapatkan pembeli berbeda beda.

Faktor yang menyebabkan kuantitas air berbeda beda pada setiap pembelian karena jual beli air menggunakan waktu sehingga terjadi beberapa kelemahan diantaranya adalah jarak. Jarak yang jauh mengakibatkan air yang diperoleh sedikit karena waktu yang digunakan tidak sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh air. Apalagi selama pengaliran atau penyedotan terjadi masalah pada pemompaan seperti alat pompa nya macet atau selang yang digunakan ada kebocoran dan hal hal lain yang dapat menghambat pemompaan air tidak berjalan mulus, sedangkan waktu terus berputar.

Jika terjadi ketidakrelaan dari si pembeli air karena air yang di dapatkannya sedikit atau tidak sesuai dengan biasanya, maka jual beli air dengan standar waktu mengandung sebuah ketidak pastian atau ketidak jelasan dalam takaran dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Muthaffiffin ayat 1-3. Dalam ayat tersebut, yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ini untuk melindungi hak hak penjual dan pembeli, tidak ada rahasia antara penjual dan pembeli dan tidak adanya sesuatu yang tidak jelas (*gharar*). Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan lemparan dan yang mengandung *gharar* (tipuan). (H.R Ahmad).

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* jelas dilarang dalam Islam, misalnya menjual buah yang masih ada di pohon. Seperti halnya jual beli air dengan standar waktu yang tidak diketahui jelas seberapa banyak air yang didapatkan. Air adalah benda yang dapat diukur dengan takaran volume, bukan sesuatu yang harus diukur menggunakan waktu. Dalam melakukan transaksi dalam bisnis, manusia harus memberikan sesuai dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil. Misalnya dalam hal ini penjual telah menetapkan harga yang ditetapkan selama waktu yang digunakan. Hal tersebut sudah disepakati pula oleh kedua belah pihak. Jual beli air tersebut juga lebih banyak manfaatnya dibandingkan *madharatnya*.

Sistem harga yang digunakan memang sudah ketentuan dari pihak penjual dan disetujui oleh pihak pembeli. Karena air yang dimiliki merupakan milik pribadi, sudah ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masalah kuantitas air yang didapatkan pihak pembeli tersebut bisa diterima oleh pihak pembeli karena pihak pembeli merasa beruntung memiliki air dengan harga yang tidak terlalu mahal.

Dalam transaksi ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dikarenakan air yang didapatkan oleh masing-masing pembeli berbeda-beda. Meskipun masyarakat tidak merasa dirugikan oleh pihak penjual, namun proses jual beli ini tidak baik. Dengan demikian, pelaksanaan jual beli dengan standar waktu perspektif hukum Islam yang merujuk kepada hukum *wad'i* jual beli tersebut tidak sah dan menurut pandangan dalam hukum *taklifi* hukumnya haram.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli air standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara dilakukan dengan cukup baik. Penjual menyediakan sumber air untuk dilakukan jual beli. Kemudian calon pembeli dan penjual melakukan negosiasi harga untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika sudah terjadi kesepakatan antara keduanya, maka terjadilah proses jual beli tersebut. Transaksi dilakukan di rumah penjual air dengan akad yang dilakukan secara langsung.
2. Pelaksanaan jual beli air standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, transaksi ini tidak sah (batal) dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Rukun yang tertera dalam transaksi jual beli tersebut jelas, namun syarat yang tertera tidak terpenuhi secara jelas, karena kuantitas benda tersebut tidak jelas (*gharar*). Meskipun dalam kenyataan di lapangan, masyarakat tidak merasa keberatan, namun transaksi jual beli tersebut tidak baik dan tidak boleh dilanjutkan. Pelaksanaan jual beli ini menurut perseptif hukum Islam tidak sah dan hukumnya haram.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran saran, yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli air standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, khusus untuk para penjual yang menjual air sebaiknya melakukan proses jual beli yang jumlah dan ukuran yang didapatkan oleh pihak pembeli sama rata, tidak ada perbedaan yang didapatkan oleh pihak pembeli. Jika ingin melakukan proses jual beli menggunakan waktu, hendaknya menggunakan alat ukur dengan takaran yang lebih jelas kadarnya, seperti kubik, liter yang telah disepakati sebagai ukuran pasti, misalnya waktu yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli tersebut disamakan. Pihak penjual sebaiknya menyediakan paralon yang menggunakan sistem kunci supaya tidak khawatir air yang dikeluarkan akan tumpah di jalan.
2. Pelaksanaan jual beli ini diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhoan, suka sama suka bagi para pihak, selalu bertindak jujur, menghindari dari kasus tipu menipu dan menghindari proses jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam. Jika proses tersebut masih terus dilakukan maka akan merugikan banyak pihak. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud dan akad transaksi jual beli tersebut akan menjadi sah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, Jakarta: PT. J-Art, cet. ke-12, 2004 M, 1425 H.

Al-Hadist

Alkaf, Idrus H, *Ikhtisar Hadits: Shahih Bukhari, (Terj.)*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2012.

Buku Penunjang

Al-Aqhsalany, Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, (Terj.)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2012.

Al-Jazairy, Abdurrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzhabib al-Arba'ah, Juz II*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.

Al-Utsmain, Muhammad bin Sholeh *Al-Usul min 'ilm al-Usul* Penj. Abu Shilah dkk, t.tp: 2007.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.

As-Sindi, Muhammad bin Abdul Hadi, *Kifayah Al Hajat Fi Syarh Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1138 H.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, penerjemah: Abdul Hayyie Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazzally, Abd Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2010.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Rosdakarya, 2015.

Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan kitab Al-Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2011.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Edisi 1 cet ke-13*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Mubarok, M. Abid, *Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Program Sarjana, Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz III dan IV*, JAKARTA:Penerbit Lentera, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Musthafa, Adib Bisri, dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.

Prasetio, Rizki Eka, *Praktik Jual Beli Air dari Sumber Mata Air Umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi Program Sarjana Muamalat, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rusdy, Ibnu, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, Semarang:Toha Putra 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 12, cet ke-10*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Soemitro, Ronny Hanitedjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Galia Indonesia, 1982.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Yazied, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian*
Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo, 2017.

Jurnal

Nur, Efa Rodiah, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No 1 2015, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016.

Sasongko, Endar Budi, dkk, Kajian Kualitas Air dan Penggunaan Sumur Galian oleh Masyarakat di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 12 issue:72-82, 2014.

Wawancara

Ibu Wati, wawancara dengan pembeli, Bukit Kemuning, 26 Juli 2020.

Ibu Rasimah, wawancara dengan pembeli, Bukit Kemuning, 12 Juli 2020.

Bapak Rian, wawancara dengan pembeli, Bukit Kemuning, 26 Juli, 2020.

Ibu Enita, wawancara dengan pembeli, Bukit Kemuning, 26 Juli 2020.

Bapak Yudi, wawancara dengan penjual, Bukit Kemuning, 13 Juli 2020.

Bapak Safarudin, wawancara dengan pembeli, 20 Juli 2020.

Bapak Bangunawan, wawancara dengan penjual, 12 Juli 2020.



LAMPIRAN



**Panduan Wawancara Jual Beli Air dengan Standar Waktu kepada Penjual
dan Pembeli Air**

A. Penjual Air

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi penjual air?
2. Apasaja faktor yang mendorong untuk menjual air?
3. Darimana asal air untuk dijual?
4. Apakah dalam mengambil air ada biaya yang harus dikeluarkan?
5. . Apakah akad yang Bapak gunakan? Lisan atau tertulis?
6. Apakah ada persengketaan antara penjual air?
7. Jika ada, bagaimana cara menyelesaikan persengketaan tersebut?
8. Apakah ada kesulitan dalam menjual air?

B. Pembeli Air

1. Sejak kapan jual beli air berlangsung di sini?
2. Apa faktor yang mendorong untuk melakukan jual beli air?
3. Seperti apa sistem jual beli air tersebut? Apakah pesanan atau langsung?
4. Akad apa yang digunakan? Secara lisan atau tertulis?
5. Bagaimana cara pembayaran dan di mana?
6. Apakah Bapak/ Ibu diuntungkan dengan adanya jual beli air ini?
7. Apakah ada selisih harga dengan penjual yang lain?

Surat Keterangan Wawancara

Identitas Penjual:

1. Nama: Bapak Bangunawan

Umur: 55 tahun

Pekerjaan: Petani

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

2. Nama: Bapak Yudi

Umur: 45 tahun

Pekerjaan: Petani

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

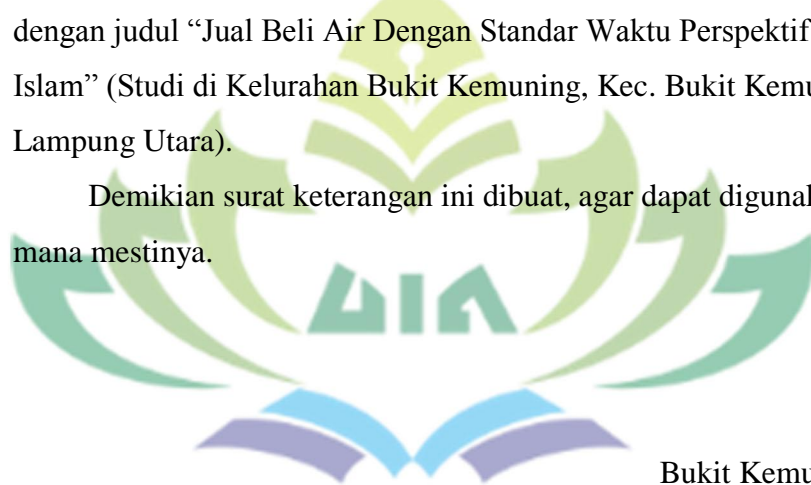
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

Identitas Pembeli

1. Nama: Ibu Rasimah

Umur 62 tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

2. Nama: Ibu Enita

Umur: 30 tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

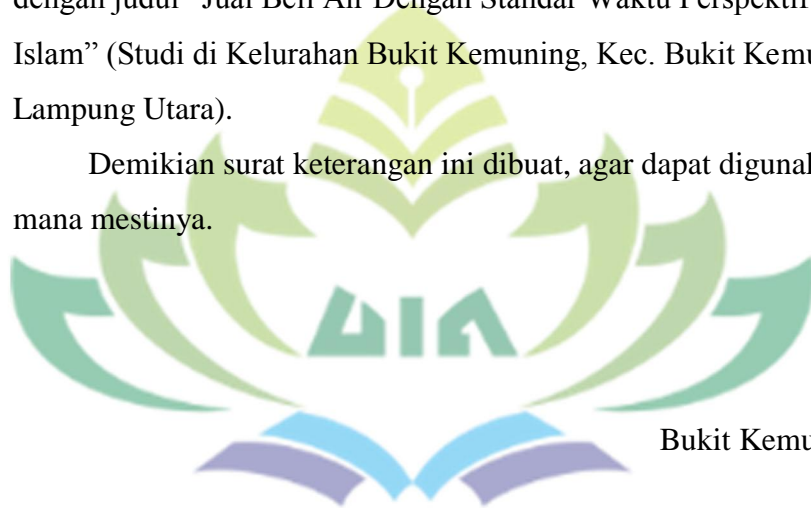
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

3. Nama: Ibu Wati

Umur: 50 tahun

Pekerjaan: Pedagang

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

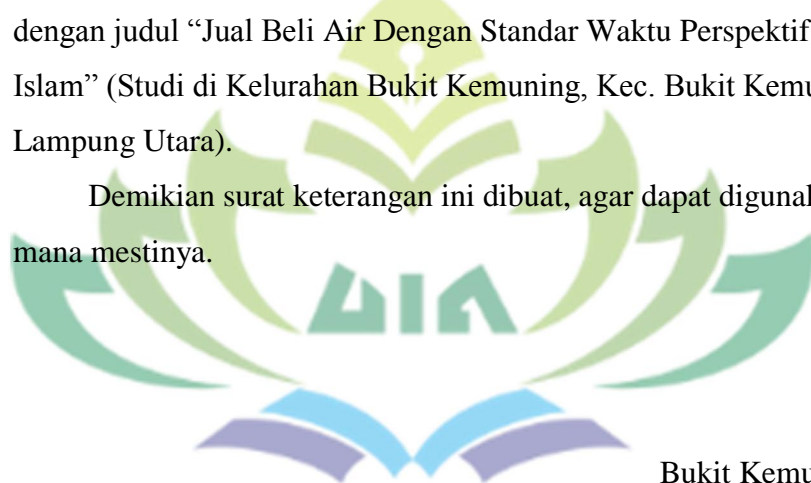
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

4. Nama: Ibu Siska

Umur: 30 tahun

Pekerjaan: Guru

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

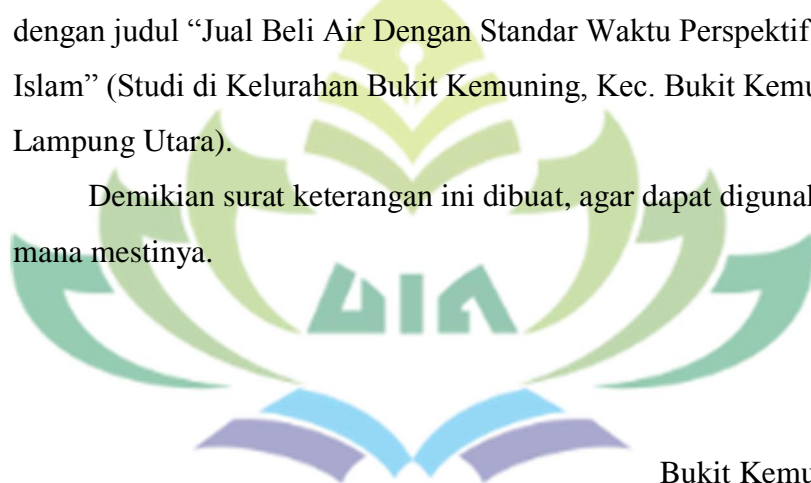
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

5. Nama: Bapak Rian

Umur: 31 tahun

Pekerjaan: Pedagang

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

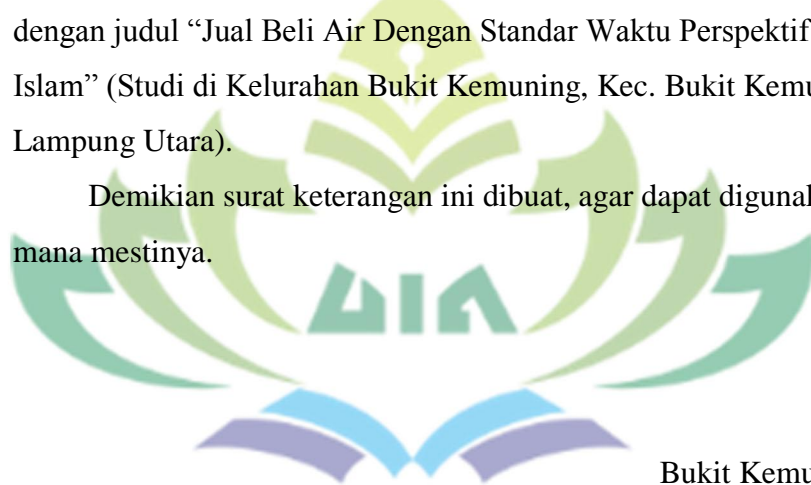
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

6. Nama: Bapak Safarudin

Umur: 43 tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

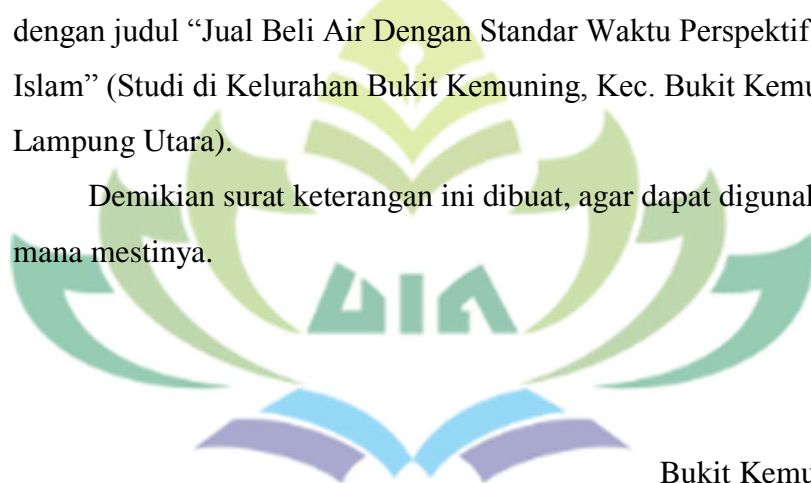
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

7. Nama: Ibu Sari

Umur: 30 tahun

Pekerjaan: Guru

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

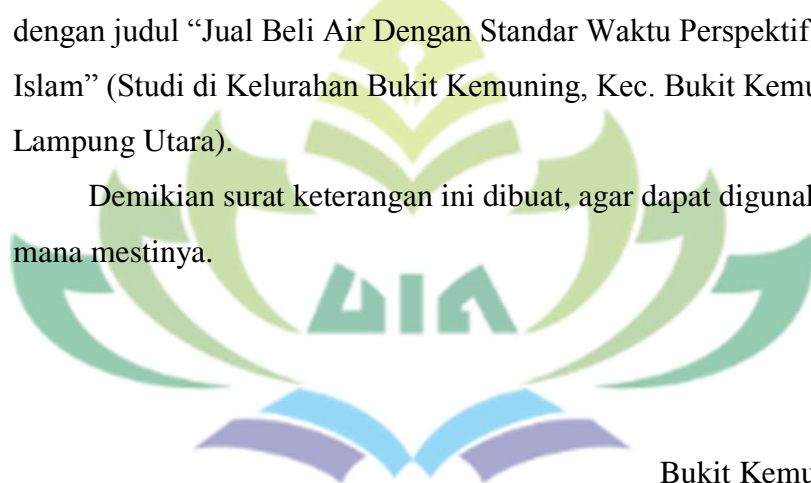
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

8. Nama; Ibu Widi

Umur: 45 tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

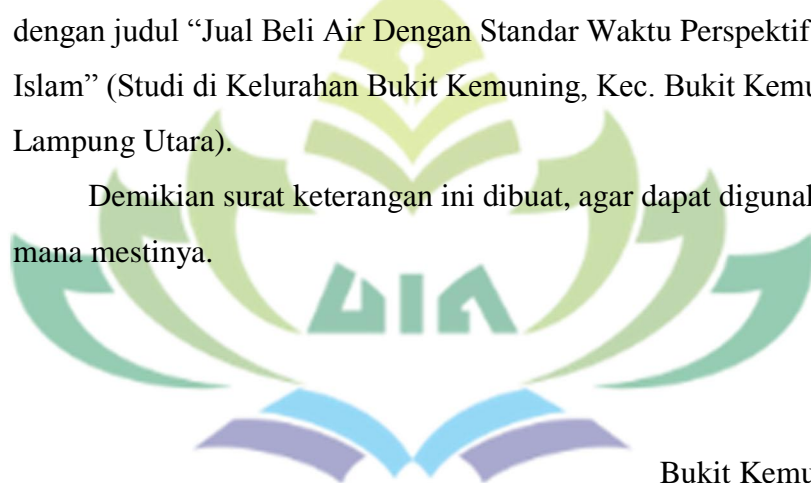
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

9. Nama: Suhardi

Umur: 52 tahun

Pekerjaan: Wiraswata

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

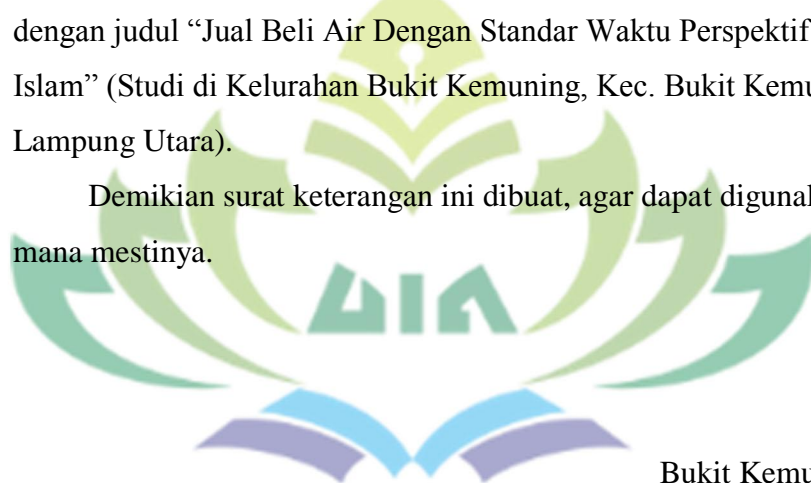
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden

Surat Keterangan Wawancara

10. Nama: Ibu Suparmi

Umur: 65 tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa:

Nama: Deva Dwi Pebianti

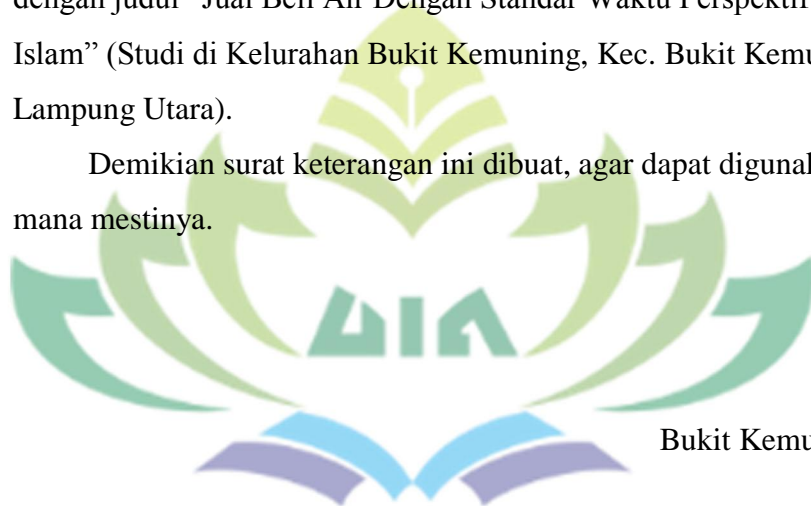
NPM: 1621030430

Fakultas: Syariah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Bukit Kemuning, 2020

Responden